

VERBAL

1. Dikerjakan Oleh : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan Oleh : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
7. Dita'lik/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman surat : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
9. Dikirim oleh : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA TAHUN 2020-2045.

		Kota Bima, 2021	
NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA		
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KOTA BIMA		
3	KEPALA DINAS PPKB KOTA BIMA		
4	KABAG HUKUM SETDA KOTA BIMA		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA BIMA TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi, perlu di susun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima Tahun 2020-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA TAHUN 2020-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kota Bima tahun 2020-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun GDPK dan RPJMD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.



Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup GDPK terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI
- d. BAB IV : KEKUATAN, KENDALA, PELUANG DAN TANTANGAN
- e. BAB V : ISU STRATEGIS DAN ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Ruang Lingkup GDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh tim pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Unsur tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Daerah.
- (4) Tim pengendalian bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 November 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 25 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 702



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA BIMA
TAHUN 2020-2045



GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA BIMA TAHUN 2020 - 2045



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020

Handwritten signature or initials.



bkkbn 

Grand Design

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA BIMA TAHUN 2020 - 2045



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

e 9/1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dokumen *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kota Bima Tahun 2020 bisa terselesaikan sesuai Perpres Nomo 153 Tahun 2014 dan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 178/DP3AP2KB/ Tahun 2019.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima Tahun 2020-2045 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan Kota Bima. Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan lainnya. Oleh karena itu *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kota Bima dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Kota Bima. Dengan disusunnya *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kota Bima ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan-pembangunan lainnya.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan. Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kependudukan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Penanggulangan Kemiskinan. Dengan telah selesainya penyusunan dokumen ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kota Bima ini bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kota Bima, November 2020
KEPALA DINAS PP DAN KB KOTA BIMA


Nurjanah, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631016 198703 2 009

~ ~ ~

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Visi Pembangunan Kependudukan Kota Bima	8
1.4 Misi Pembangunan Kependudukan Kota Bima	8
1.5 Arah Kebijakan.....	8
1.6 Tujuan.....	9
1.7 Sasaran.....	10
1.8 Hubungan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	10
BAB II KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN	
2.1 Kondisi Geografis	13
2.2 Kondisi Kewilayahan	14
2.3 Kondisi Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi.....	14
Peta Wilayah Kota Bima	15

n 9/k

BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

3.1	Kuantitas Penduduk.....	16
3.1.1	Jumlah Penduduk	16
3.1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	17
3.1.3	Kepadatan Penduduk	18
3.1.4	Penduduk Lanjut Usia (Lansia).....	20
3.1.5	Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan Fertilitas	21
3.1.6	Keluarga Berencana.....	22
3.1.7	Usia Kawin Pertama	26
3.1.8	Proyeksi Penduduk Kota Bima Tahun 2020-2045.....	27
3.2	Kualitas Penduduk.....	42
3.2.1	Aspek Pendidikan	42
3.2.2	Aspek Kesehatan	44
3.2.3	Aspek Ekonomi.....	48
3.3	Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	50
3.3.1	Distribusi dan Persebaran Penduduk	52
3.3.2	Migrasi	53
3.3.3	Pembangunan Keluarga.....	53
3.3.4	Manajemen Data Base Kependudukan	55

BAB IV KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

4.1	Kekuatan.....	59
4.2	Kendala	61
4.3	Tantangan	63
4.4	Peluang	64

~ 9/6

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2017.....	16
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima 2015, 2016, dan 2017.....	17
Tabel 3.3 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Bima	17
Tabel 3.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2017	18
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis dan Dependency Ratio Kelamin di Kota Bima, 2107	19
Tabel 3.6 Jumlah Dan Persentase Penduduk Usia Lanjut Kota Bima	20
Tabel 3.7 Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan Fertilitas Kota Bima dan Proyeksi s.d Tahun 2045	21
Tabel 3.8 <i>Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi di Kota Bima Tahun 2017</i>	23
Tabel 3.9 <i>Peserta KB PUS, PA, PA/PUS</i>	23
Tabel 3.10 <i>Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019</i>	25
Tabel 3.11 Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kota Bima Dari Tahun 2015-2019	25
Tabel 3.12 <i>Proyeksi Penduduk Kota Bima 2020-2045</i>	27
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2018.....	28
Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2020.....	30
Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2025.....	32
Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2030.....	34
Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2035.....	36
Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2040.....	38
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2045.....	40

Tabel 3.20 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Bima, 2018.....	43
Tabel 3.21 <i>Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bima</i>	44
Tabel 3.22 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tahun 2015-2019 di Kota Bima.....	45
Tabel 3.23 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bima, 2015-2017.....	45
Tabel 3.24 <i>Jumlah Kelahiran Hidup menurut Kecamatan Kota Bima</i>	46
Tabel 3.25 Jumlah Kematian Ibu per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima	47
Tabel 3.26 <i>Jumlah Kematian Bayi per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima</i>	47
Tabel 3.27 Jumlah Gizi Buruk per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima	47
Tabel 3.28 <i>Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur Menurut Kecamatan (persen) di Kota Bima, 2018</i>	48
Tabel 3.29 <i>Penduduk Miskin di Kota Bima 2015-2019</i>	48
Tabel 3.30 PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bima Tahun 2014-2017 (Juta Rupiah)	49
Tabel 3.31 <i>Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bima, 2017</i>	50
Tabel 3.32 <i>Luas Wilayah Dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima 2017</i>	52
Tabel 3.33 <i>Jumlah Dan Persentase Keluarga Pra-Sejahtera Dan KS-1</i>	54
Tabel 3.34 Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Status Cetak KTP-El Tahun 2016-2017	57
Tabel 3.35 <i>Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan dan Cetak Kartu Keluarga (KK)</i>	58
Tabel 3.36 <i>Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan dan Cetak Akta Kelahiran</i>	58
Tabel 5.1 <i>Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Bima 2020-2045</i>	70

Handwritten signature

Tabel 5.2 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk di Kota Bima 2020-2045.....	71
Tabel 5.3 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator Parameter Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kota Bima 2020-2045.....	72
Tabel 5.4 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator Parameter Pembangunan Keluarga Kota Bima 2020-2045.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama Tahun 2020-2045.....	9
Gambar 1.2 Kerangka Pikir Perumusan Rancangan Induk atau <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kota Bima.....	12
Gambar 5.1 Roadmap Kebijakan dan Program Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan	68
Gambar 5.2 Roadmap Kebijakan dan Program Pengendalian Kuantitas Kependudukan	69
Gambar 5.3 Roadmap Kebijakan dan Program Pengendalian Kualitas Kependudukan	70
Gambar 5.4 Roadmap Kebijakan dan Program Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan	71
Gambar 5.5 Roadmap Kebijakan dan Program Pembangunan Keluarga	72
Gambar 5.6 Roadmap Kebijakan dan Program Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan	73

Handwritten signature

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Setiap Program Pembangunan Baik jangka pendek, menengah dan panjang senantiasa memiliki sasaran dan tujuan tertentu, Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Indonesia baik Nasional maupun Daerah Tingkat I dan Tingkat II, sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tatanan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan tersebut, kiranya terwujud dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras dan berkesinambungan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta ber taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu diadakan upaya pengembangan dan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Kendati pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas dan maju berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi bagi sebagian pengambilan kebijakan, pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap tidak merisaukan. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas, sebagai salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi domain yang kemudian harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, pangan dan pakaian. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya secara langsung



berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali, demikian juga halnya dengan kebutuhan dasar lainnya. Memang hubungan antara keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kompleksitas hubungan yaitu teknologi dan organisasi. Akan tetapi aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan dan tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks kota Bima, salah satu isu strategis yang terkait dengan perkembangan kualitas penduduk di Kota Bima adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan terjadinya perubahan komposisi penduduk menurut umur dimasa lalu. Kota Bima adalah salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota yang mendapat bonus demografi kedua dari Kota Mataram, sehingga Kota Bima Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76.37 atau tergolong dalam kategori IPM sedang artinya dari setiap 100 penduduk terdapat penduduk usia produktif atau jumlah penduduk yang usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif.

Tahapan *windows of opportunity* ditandai dengan angka komposisi ketergantungan yang semakin rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya penduduk lansia harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat tahapan selanjutnya yakni dimana kondisi tersebut merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai.

Persoalan yang terkait dengan pertumbuhan dan komposisi penduduk, Kota Bima masih dihadapkan pada masalah ketimpangan distribusi penduduk antar kecamatan, persoalan ketimpangan distribusi penduduk pada dasarnya erat kaitannya dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Disatu pihak ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan over population yang ditunjukkan oleh diantaranya adalah kepadatan

penduduk dan tekanan penduduk, dipihak lain muncul persoalan optimalisasi sumber daya alam khusus di daerah yang kaya sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit.

Permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi lebih dari itu, persoalan tersebut merupakan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi. Hal tersebut berkaitan juga dengan pemikiran secara konseptual bahwa hubungan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi bersifat resiprokal (timbang balik). Dari satu sisi, ketika variabel kependudukan diletakkan sebagai variabel bebas, maka setiap intervensi untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Sementara itu, perubahan lingkungan strategis, baik pada skala internasional, nasional maupun internal, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan kependudukan. Pada skala internasional, kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, MDG, SDG dan juga kesepakatan internasional lainnya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan penting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No.52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana paska ICPD dan untuk aktualisasinya dalam kerangka otonomi daerah telah diperkuat dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual.

Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat. Pertama adalah perubahan kewenangan pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang menuntut adanya pemahaman dan komitmen pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari para pimpinan daerah. Kedua, sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan kependudukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Kota Bima merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, berupa kebijakan umum dalam bentuk Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan penjabaran dari RPJP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 dan RPJMD Kota Bima dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan kependudukan melalui pembentukan kelompok kerja (*working group*).

Melalui Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/668/478/X/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tingkat Kota Bima Periode 2019-2024 telah terbentuk lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun rancangan induk atau *grand design* termasuk *roadmap* pembangunan kependudukan. Kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:

v g/k

1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kelompok Kerja I);
2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (Kelompok Kerja II);
3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja III);
4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk (Kelompok Kerja IV);
5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan (Kelompok Kerja V).

Kelima kelompok kerja tersebut telah bekerja secara maksimal dan telah menghasilkan konsep rancangan induk atau *grand design*. Hasil dari kelima kelompok kerja tersebut merupakan sumber utama dalam penyusunan GDPK pembangunan kependudukan ini.

Dengan kata lain, dokumen GDPK ini merupakan integrasi dan penyerasian hasil kerja dari kelima kelompok kerja. diharapkan dokumen GDPK ini dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kota Bima serta mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya.

GDPK merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Kota Bima dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045. Dengan demikian, dalam dokumen ini dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap SKPD/sektoral/lembaga dalam mendukung implementasi Pembangunan kependudukan di Kota Bima.

Selain itu, penyusunan GDPK juga memerhatikan beberapa dokumen yang telah ada terlebih dulu, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima (RPJMD). Diharapkan dengan menggunakan referensi tersebut, GDPK yang



dihasilkan merupakan dokumen yang komprehensif, akomodatif, dan terstruktur.

1.2. Dasar Hukum.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;

u N/k

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
26. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional;
28. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

n *gk*

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

31. Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 178/DP3AP2KB/2019 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota.

1.3. Visi Pembangunan Kependudukan Kota Bima :

“Terwujudnya Generasi Berkualitas Melalui Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

1.4. Misi Pembangunan Kependudukan Kota Bima :

1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga
2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro

1.5. Arah Kebijakan :

1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama.
2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun masyarakat.
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.
4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.



1.6. Tujuan

Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan Pembangunan Kependudukan.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis daerah adalah adanya penanganan secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan kerangka pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan, isu, kebijakan dan program kegiatan spesifik kedaerahan dengan tetap sinergis dengan tujuan pembangunan secara umum baik secara nasional maupun kewilayahan. Berikut ini disajikan landasan kerangka pikir penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kota Bima (Gambar 1.1).

Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama Tahun 2020-2045.



u Rk

1.7. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk.
3. Pencapaian kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
5. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.8. Hubungan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima dengan Dokumen Perencanaan Lain.

Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima adalah merupakan bagian integral dari

n Rk

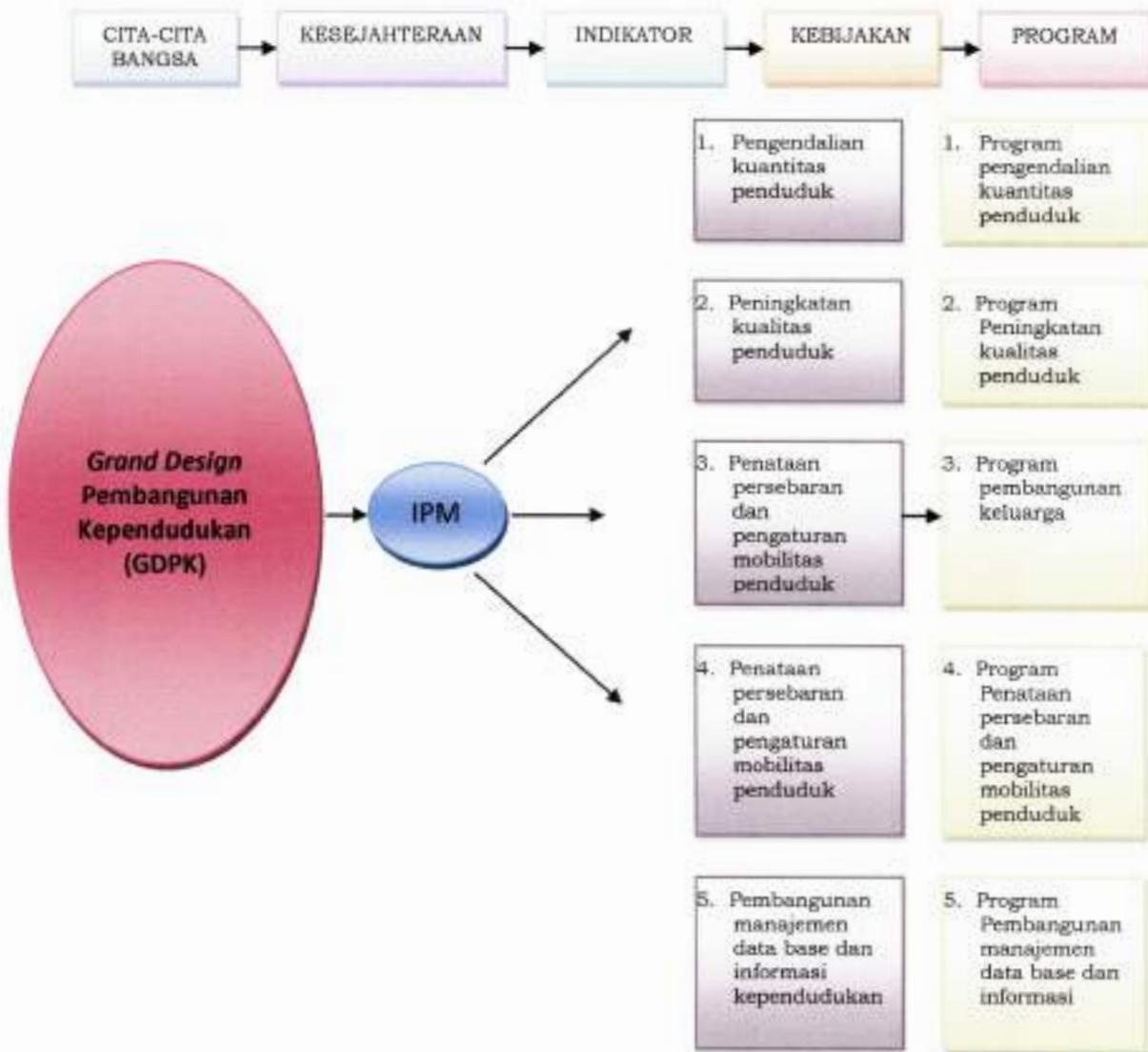
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuannya secara makro ialah tercapainya kondisi kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa, khususnya di Kota Bima.

Oleh karena itu, Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima disusun dengan berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlandaskan pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen data base dan informasi kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disamping dokumen *grand design* Pembangunan Kependudukan Nasional Tahun 2020-2045, *grand design* Pembangunan Kependudukan Nusa Tenggara Barat 2020-2045, maka Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima juga disusun dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku seperti Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Bima, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, dan Rencana Strategis Kota Bima dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan.

Secara skematis kerangka pikir perumusan Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima tersaji dalam gambar berikut (Gambar 1.2).

Gambar 1.2. Kerangka Pikir Perumusan Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bima



Handwritten signature or initials.

BAB II
KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN

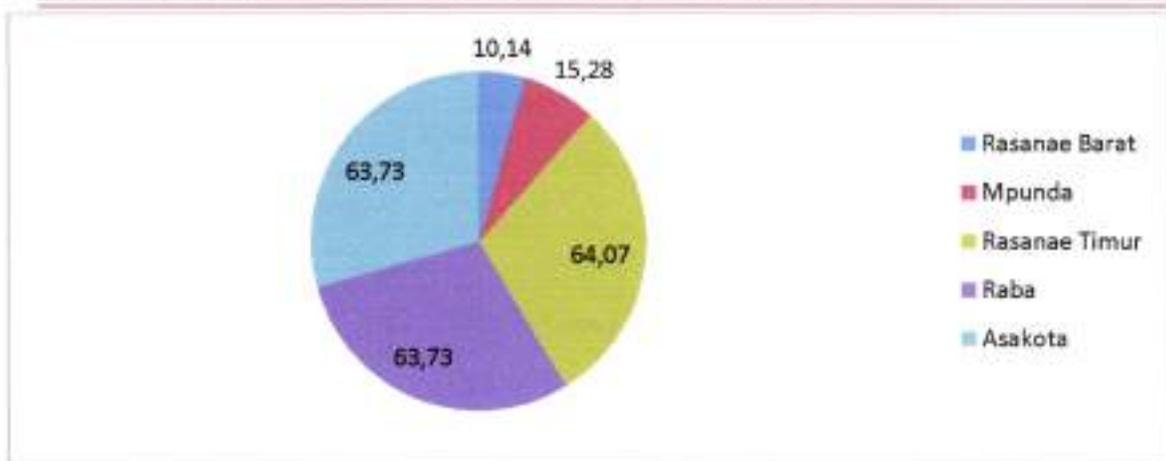
2.1. Kondisi Geografis

Uraian	Satuan	2019
(1)	(2)	(3)
Luas Wilayah	Ha	222,25
Luas Daratan	Ha	21,727
Luas Sungai	Ha	11,908

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Oktober, dengan suhu 19,5 °C sampai 30,8 °C.

Kota Bima memiliki areal tanah berupa: persawahan seluas 1.923 hektare (94,90% merupakan sawah irigasi), hutan seluas 13.154 ha, tegalan dan kebun seluas 3.632 ha, ladang dan huma seluas 1.225 ha dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 km.

Gambar 2.1. Luas Kota Bima Berdasarkan Wilayah



✓ gk

2.2. Kondisi Kewilayahan

Adapun Wilayah administrasi Kota Bima terdiri dari 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan.

No	Kecamatan	Kelurahan	Total
1	Rasanae Barat	6	6
2	Rasanae Timur	8	8
3	Asakota	6	6
4	Raba	11	11
5	Mpunda	10	10
	Total	41	41

2.3. Kondisi Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

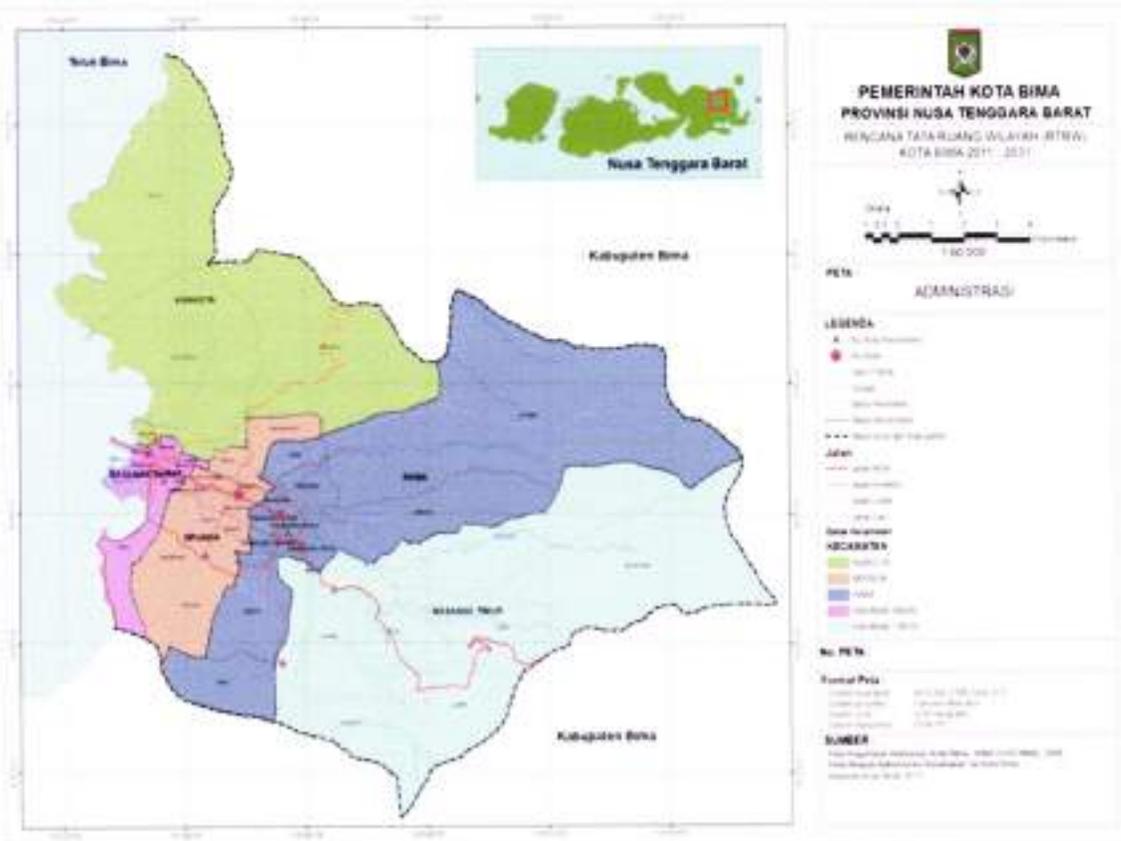
Wilayah Kota Bima beriklim tropis matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Oktober, dengan suhu 19,5 °C sampai 30,8 °C.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Kota Bima memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

n 2/12

PETA WILAYAH KOTA BIMA



Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bima

Kecamatan (1)	Luas (ha) (2)
1. Rasanae Barat	10,14
2. Rasanae Timur	64,07
3. Asakota	69,03
4. Raba	63,73
5. Mpunda	15,28
Luas Daratan	21,272
Luas Sungai	11,908
Luas Total	255,43

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka

Handwritten signature

BAB III
KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

3.1 Kuantitas Penduduk

Aspek kuantitas penduduk menelusuri tentang semua parameter yang berhubungan dengan kuantitas penduduk yaitu meliputi Jumlah penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Kepadatan penduduk, Penduduk menurut jenis kelamin atau sex rasio, penduduk menurut umur sehingga diketahui angka ketergantungan termasuk membicarakan tentang Keluarga Berencana.

3.1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Bima tahun 2017 sebanyak 166.407 jiwa yang terdiri atas 81.725 jiwa penduduk laki-laki dan 84.682 jiwa penduduk perempuan, sehingga diketahui sex rasio Kota Bima sebesar 96,5. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Raba sebanyak 41.099 jiwa, dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Rasanae Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 17.366 jiwa.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2017

No	Kecamatan (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)	Sex Rasio (5)
		Laki-Laki (2)	Perempuan (3)		
1.	Rasanae Barat	18.602	19.418	38.020	95,80
2.	Rasanae Timur	8.627	8.739	17.366	98,72
3.	Asakota	15.121	15.724	30.845	96,17
4.	Raba	20.167	20.932	41.099	96,32
5.	Mpunda	19.208	19.869	39.077	96,68
	Kota Bima	81.725	84.682	166.407	96,51

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

3.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kota Bima tahun 2016-2017 mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03 persen. Sementara itu besarnya laju pertumbuhan antar kecamatan bervariasi, yang tertinggi kecamatan Asakota 2,30 % sedangkan yang terendah adalah kecamatan RasanaE Timur 1,69 %.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2015, 2016, dan 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2016-2017
	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Rasanae Barat	36.497	37.267	38.020	2,02
2 Rasanae Timur	16.726	17.078	17.366	1,69
3 Asakota	29.532	30.152	30.845	2,30
4 Raba	39.475	40.307	41.099	1,96
5 Mpunda	37.506	38.297	39.077	2,04
Kota Bima	159.736	163.101	166.407	2,03

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

Tabel 3.3 Jumlah Rumah tangga Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2017

No	Kecamatan	Rumah Tangga
1	Rasanae Barat	9.472
2	Rasanae Timur	4.343
3	Asakota	7.705
4	Raba	10.248
5	Mpunda	9.738
	Kota Bima	41.506

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

Dari jumlah penduduk di Kota Bima tahun 2017 sebanyak 166.407, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 81.725 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 84.682 jiwa, dengan sex ratio sebesar 96,51. Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduk menurut usia di Kota Bima, terdapat jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 98.992 jiwa penduduk, sedangkan penduduk berusia non produktif (0-14 dan 65 + tahun) sebanyak 47.967 jiwa penduduk.

3.1.3 Kepadatan Penduduk

Dari jumlah penduduk di Kota Bima tahun 2017 sebanyak 166.407, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 81.725 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 84.682 jiwa, dengan sex ratio sebesar 96,51. Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduk menurut usia di Kota Bima, terdapat jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 111.459 jiwa penduduk, sedangkan penduduk berusia non produktif (0-14 dan 65 + tahun) sebanyak 54.948 jiwa penduduk.

Tabel 3.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2017

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
	(1)	(2)	(3)
1	Rasanae Barat	22,85	3750
2	Rasanae Timur	10,44	271
3	Asakota	18,54	447
4	Raba	24,70	645
5	Mpunda	23,48	2557
	Kota Bima	100	749

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis dan Dependency Ratio Kelamin di Kota Bima, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8.148	7.755	15.903
5-9	8.015	7.793	15.808
10-14	7.640	7.421	15.061
15-19	8.425	8.550	16.975
20-24	9.225	9.096	18.321
25-29	6.936	6.783	13.719
30-34	6.158	6.775	12.933
35-39	5.460	5.922	11.382
40-44	5.174	5.968	11.142
45-49	4.462	4.840	9.302
50-54	3.594	3.862	7.456
55-59	2.874	3.269	6.143
60-64	1.884	2.202	4.086
65-69	1.494	1.621	3.115
70-74	982	1.160	2.142
75-79	1.254	1.665	2.919
Jumlah	81.725	84.682	166.407
Penduduk Usia Non Produktif			54.948
Penduduk Usia Produktif			111.459

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

Selanjutnya, hal yang cukup menarik apabila ditelusuri dari struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan pembahasan komponen umur dan jenis kelamin penduduk. Struktur umur penduduk antar daerah satu dengan daerah lain tidak sama.

n n k

Struktur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga variabel ini sering saling berpengaruh satu dengan yang lain. Faktor-faktor sosial-ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi struktur umur penduduk lewat ketiga variabel demografi di atas.

Suatu daerah atau negara dikatakan struktur umur muda, apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%), sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang 3%. Sebaliknya, suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15%. Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata di Kota Bima tergolong struktur umur tua.

3.1.4 Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Selanjutnya, bila diperhatikan dinamika penduduk lanjut usia dengan batasan 60 tahun ke atas, ternyata pada tahun 2017 sebanyak 12.262 jiwa. Perubahan proporsi usia lanjut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat dan kecenderungan yang telah dicapai sebelumnya, struktur umur penduduk dan determinan lainnya. Semakin membaiknya kondisi sosial-ekonomi, fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan serta semakin membaiknya gizi dan kesehatan lingkungan hidup menunjukkan kematian dapat diturunkan sehingga usia hidup semakin tinggi dan sebaliknya.

Tabel 3.6. Jumlah Dan Persentase Penduduk Usia Lanjut Kota Bima

Kategori	Tahun 2017
Jumlah Penduduk Lansia (000 jiwa)	12.262

Oleh karena itu dimasa-masa mendatang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah-masalah seperti kerentanan penduduk

usia lanjut. Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak pemerintah atau swasta agar menciptakan lapangan kerja yang ideal bagi para penduduk usia kerja sehingga pada akhir usia mereka masih potensial dan produktif dan memiliki saving untuk jaminan hari tua.

3.1.5 Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan Fertilitas

Fertilitas adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Angka fertilitas (kelahiran) sangat erat hubungannya dengan tingkat kesehatan masyarakat, khususnya dalam keluarga berencana. Ukuran yang sering dan umum digunakan dalam fertilitas adalah angka kelahiran total (Total Fertility Rate = TFR) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate = ASFR).

Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang dihitung berdasarkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) tahun 2010 di Kota Bima sebesar 2,48 anak dan diperkirakan berdasarkan hasil proyeksi TFR Kota Bima akan turun menjadi 2,25 anak pada tahun 2020, dan di harapkan turun 1,50 pada Tahun 2045.

Tabel 3.7 Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan Fertilitas Kota Bima dan Proyeksi s.d Tahun 2045

Tahun	ASFR							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
2015	16.975	18.321	13.719	12.933	11.382	11.142	9.302	2,35
2020	17.632	19.128	14.372	13.376	11.896	11.931	10.824	2,25
2025	19.632	20.228	15.841	14.391	12.546	12.678	11.622	2,15
2030	20.747	22.425	16.362	15.465	13.479	13.554	12.535	2,10
2035	21.010	23.652	18.178	16.341	14.507	14.571	13.215	1,89
2040	21,828	24,575	18,937	16,925	15,345	15,115	13,879	1,75
2045	22,015	25,274	19,210	17,317	16,115	16,225	14,417	1,50

Handwritten signature

3.1.6 Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Nasional adalah program untuk membantu keluarga termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Dengan terbentuknya keluarga berkualitas maka generasi mendatang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat melanjutkan pembangunan. Program Keluarga Berencana dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan dapat memberikan kontribusi dalam hal mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pemakaian alat kontrasepsi akan mempengaruhi fertilitas wanita melalui status fekunditasnya (kemampuan melahirkan), serta dapat mengatur panjang-pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan dengan menggunakan cara-cara kontrasepsi (PIL, IUD, Kondom, Suntik, MOP, MOW).

Adapun pengetahuan, sikap, dan praktek KB dari seluruh penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi penduduk seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, daerah, desa atau kota.

Hasil laporan rutin Tahun 2017 menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi di Kota Bima adalah 86,64 %, atau sebanyak 24.346 akseptor dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 28.101 yang ada.

Cara KB suntikan adalah yang paling umum dipakai yakni sebanyak 8.456 akseptor atau 18,30 % dari total akseptor.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga cukup populer, seperti IUD digunakan oleh 6.468 akseptor atau sebesar 23,02 %, implant digunakan oleh sebanyak 4.440 atau sebesar 15,80 %, MOW sebanyak 1.207 akseptor atau 4,30 % dan MOP sebanyak 73 akseptor

atau sebesar 0,26 %, sehingga total peserta KB aktif yang menggunakan MKJP sebanyak 12.188 akseptor atau sebesar 43,37 %.

Tabel 3.8. Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi di Kota Bima Tahun 2017

METODE KONTRASEPSI	Jumlah	%
IUD	6.468	23,02
MOW	1.207	4,30
MOP	73	0,26
KONDOM	1.444	5,14
IMPLANT	4.440	15,80
SUNTIKAN	8.456	18,30
PIL	2.258	8,04
JUMLAH	24.346	86,64
MKJP	12.188	43,37

Sumber: Dinas PPKB Kota Bima 2017

Dengan demikian, peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi melalui revitalisasi program dengan sasaran wanita kawin umur muda dan paritas rendah (Mupar) merupakan prioritas.

Tabel 3.9. Peserta KB PUS, PA, PA/PUS

Kecamatan	PUS (2016)	PA	%PA/PUS
RasanaE Barat	6.498	5.506	84,73
RasanaE Timur	3.915	3.693	94,33
Asakota	5.340	4.560	85,39
Raba	7.167	5.986	83,52
Mpunda	5.181	4.601	88,81
Kota Bima	28.101	24.346	86,84

Sumber: Dinas PPKB Kota Bima

Kontribusi pemakaian alat/obat kontrasepsi terhadap penurunan fertilitas sangat dipengaruhi pula oleh jumlah PUS menurut usia dan jumlah anak yang telah dimiliki. Pasangan Usia Subur usia muda dengan jumlah anak sedikit atau disebut Pus Muda Paritas Rendah

(Pustumuparen) sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas dibandingkan dengan peserta KB dari Pus usia tua paritas tinggi (Pustuparti) demikian pula dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas penggunaan kontrasepsi.

Selanjutnya, pendidikan merupakan variabel yang penting dalam studi perbedaan fertilitas dan keluarga berencana, karena variabel ini banyak berpengaruh terhadap perubahan status, sikap dan pandangan hidup masyarakat pada umumnya, wanita pada khususnya.

Meningkatnya pendidikan wanita dapat merubah pandangan hidup yang tradisional, dari pandangan bahwa wanita adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus tinggal di rumah mengurus anak dan suami, ke arah pandangan yang lebih maju yang mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, dan ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Dari kenyataan di atas tentu saja akan mendorong wanita lebih menyukai keluarga kecil yang akan memberi keleluasaan bergerak kepada mereka dari pada bila memiliki keluarga besar dengan banyak anak. Anggapan tersebut di atas rupa-rupanya dipakai sebagai dasar dari teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah fertilitasnya, atau dengan kata lain terjadi hubungan yang negatif antara fertilitas dan tingkat pendidikan. Akan tetapi dalam berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia, hasilnya ternyata tidak selalu konsisten dengan teori di atas. Salah satu bukti dari hasil Survey Fertilitas Mortalitas yang pernah dilakukan ternyata menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dengan fertilitas mempunyai hubungan yang positif.

Berdasarkan hasil statistik rutin yang ada ternyata tingkat efektifitas pemakaian kontrasepsi di Kota Bima Cukup baik ditandai dengan jumlah peserta KB yang drop out Rendah. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB aktif sebanyak 20.026 akseptor, sementara itu jumlah peserta KB baru secara komulatif yang didapatkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 24.346 Akseptor ,



artinya tren pemakaian alat kontrasepsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman PUS tentang ber KB mengalami peningkatan.

Tabel. 3.10. Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RasanaE Barat	4.523	5.035	4.828	5.187	5.506
RasanaE Timur	2.571	2.764	2.676	2.929	3.693
Asakota	4.230	4.834	4.218	4.661	4.560
Raba	5.158	5.784	5.431	6.039	5.986
Mpunda	3.544	3.754	4.057	4.446	4.601
Kota Bima	20.026	22.171	21.210	23.262	24.346

Sumber: Dinas PPKB Kota Bima

Tabel. 3.11. Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kecamatan Di Kota Bima, Dari Tahun 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RasanaE Barat	756	625	576	622	599
RasanaE Timur	1.204	669	499	457	637
Asakota	847	741	646	584	569
Raba	1.237	803	848	774	866
Mpunda	1.111	998	828	588	886
Kota Bima	5.155	3.836	3.397	3.025	3.557

Sumber: Dinas PPKB Kota Bima

n 9/6

3.1.7 Usia Kawin Pertama

Jika dilihat dari variabel umur pada waktu kawin ternyata juga memberikan gambaran yang cukup menarik. Umur pada waktu kawin adalah merupakan variabel yang menunjukkan saat dimulainya hubungan kelamin. Oleh karena itu, variabel ini mempengaruhi fertilitas secara langsung, di mana pada saat itulah wanita memulai masa reproduksinya dengan mengabaikan jumlah kelahiran sebelum perkawinan. Di samping itu, umur pada waktu kawin juga menentukan perpanjangan masa reproduksi wanita.

Dengan mengikuti pemikiran di atas, apabila umur pada waktu kawin bagi wanita-wanita dilakukan seawal mungkin atau dalam umur muda maka diprediksi akan mempunyai lebih banyak anak dari pada wanita-wanita yang umur pada waktu kawinnya lebih tua, yang dengan sendirinya lama masa reproduksinya relatif lebih pendek. Bukti dari Survey Fertilitas Mortalitas yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa wanita-wanita yang umur pada waktu kawinnya lebih muda dalam hal ini berumur di bawah 15 tahun, mempunyai anak lebih banyak bila dibandingkan dengan mereka yang memulai perkawinannya pada umur 21 tahun ke atas. Hal ini berarti ada korelasi yang negatif antara umur pada waktu kawin dengan fertilitas.

Sebenarnya variabel umur pada waktu kawin ini sangat dipengaruhi oleh variabel pendidikan dan status ekonomi. Wanita yang berpendidikan lebih tinggi yang otomatis status ekonominya tinggi pula akan menunda perkawinannya, karena wanita-wanita tersebut akan lama menghabiskan waktunya dibangku sekolah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang berpendidikan lebih tinggi dan status ekonomi lebih tinggi pula akan menunda masa perkawinannya, sehingga peluang untuk mempunyai anak yang lebih banyak akan berkurang dan dengan sendirinya akan menekan tingkat fertilitas.

Di Kota Bima median rata-rata kawin pertama umur 21 tahun, sedangkan di Nusa Tenggara Barat rata-rata umur kawin pertamanya

adalah 16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wanita Kota Bima kawin lebih tua dari pada wanita secara provinsi.

Hal ini sangat berkorelasi dengan tingkat partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-16 bagi jenis kelamin perempuan Kota Bima sebesar 90,05 %. Semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan dalam setiap jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka semakin lama penundaan usia kawin pertamanya.

3.1.8 Proyeksi Penduduk Kota Bima Tahun 2020-2045

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bima selama tiga puluh lima tahun mendatang terus mengalami peningkatan. Pola kependudukan ke depan di Kota Bima diwarnai oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun ke luar.

Selanjutnya, cukup menarik apabila diperhatikan gambaran piramida penduduk menurut tahun. Piramida penduduk tahun 2015 menunjukkan pola yang tidak menggembung lagi atau menyerupai "Candi Borobudur", tetapi sudah berubah lebih ramping menyerupai "Candi Prambanan" hingga periode akhir proyeksi. Ini mengindikasikan bahwa selama periode 2020-2045 penduduk di Kota Bima akan diwarnai oleh pola migrasi penduduknya.

Tabel 3.12 Proyeksi Penduduk Kota Bima 2020-2045

Tahun	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
2020	86.883	89.819	176.702
2025	94.561	98.038	192.599
2030	102.149	106.865	209.014
2035	109.409	113,555	222.964
2040	112.213	115265	227.478
2045	113.905	117.000	230.905

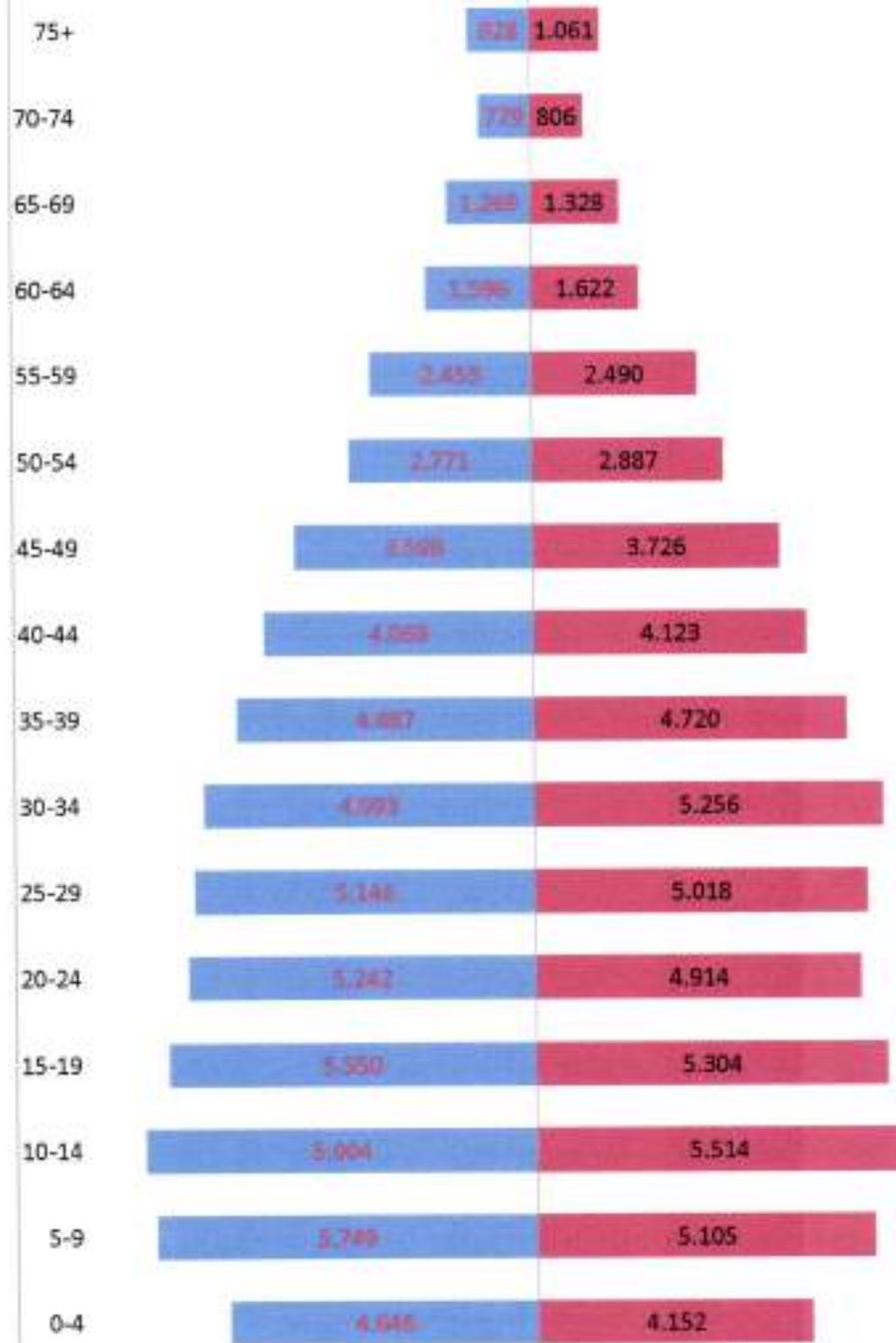
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2018

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.646	4.152	8.798
5-9	5749	5.105	10.854
10-14	5.904	5.514	11.418
15-19	5.550	5.304	10.854
20-24	5.242	4.914	10.156
25-29	5.146	5.018	10.164
30-34	4.993	5.256	10.249
35-39	4.487	4.720	9.207
40-44	4.069	4.123	8.192
45-49	3.598	3.726	7.324
50-54	2.771	2.887	5.658
55-59	2.453	2.490	4.943
60-64	1.596	1.622	3.218
65-69	1.269	1.328	2.597
70-74	779	806	1.585
75+	928	1.061	1.989
Total	59.180	58.026	117.206

Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka 2018

Piramida Penduduk Kota Bima 2018

■ Perempuan ■ Laki-laki



Handwritten signature

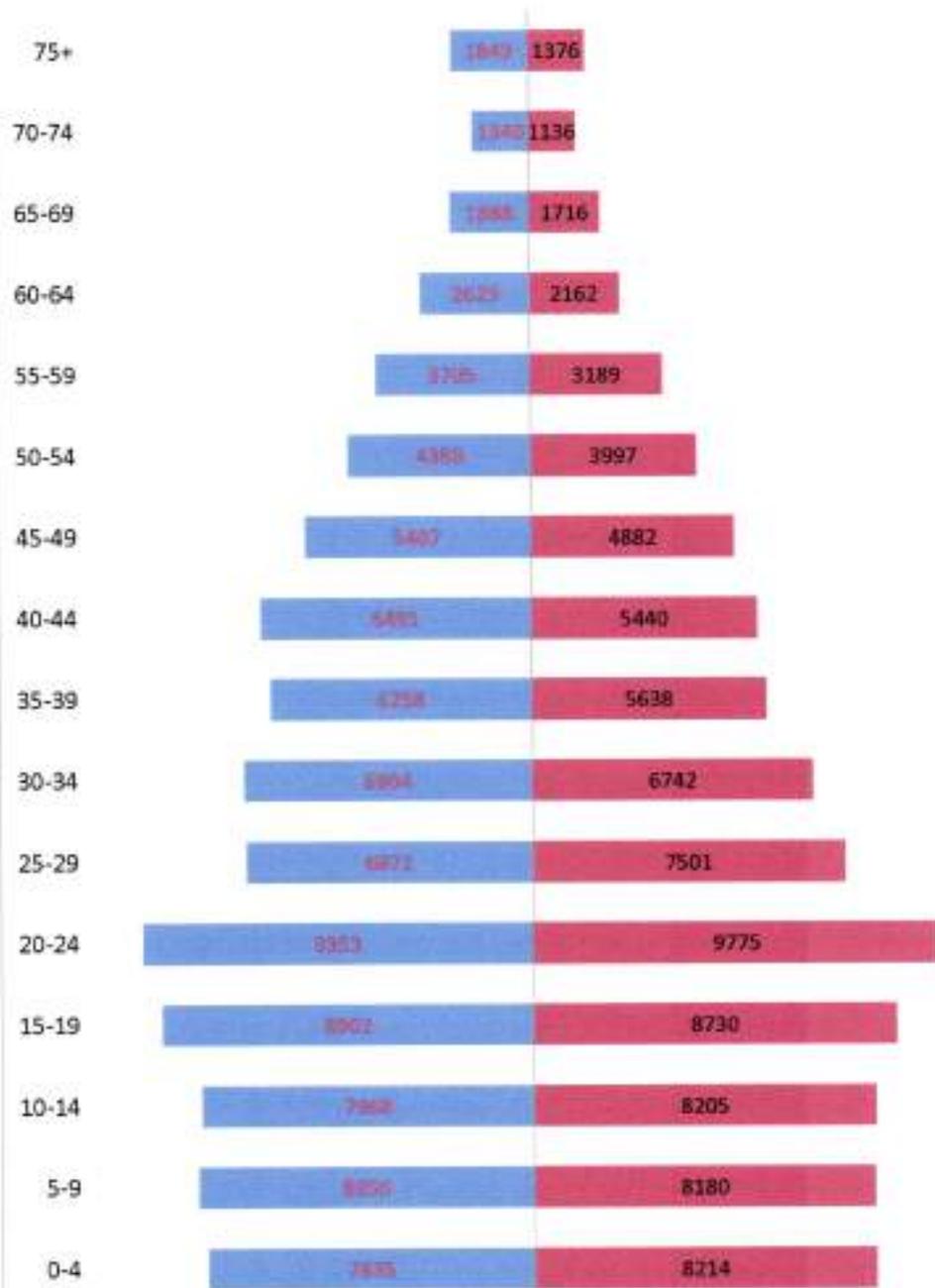
*Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2020*

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.214	7.835	16.049
5-9	8.180	8.056	16.236
10-14	8.205	7.968	16.173
15-19	8.730	8.902	17.632
20-24	9.775	9.353	19.128
25-29	7.501	6.871	14.372
30-34	6.742	6.904	13.646
35-39	5.638	6.258	11.896
40-44	5.440	6.491	11.931
45-49	4.882	5.407	10.289
50-54	3.997	4.369	8.366
55-59	3.189	3.705	6.894
60-64	2.162	2.623	4.785
65-69	1.716	1.888	3.604
70-74	1.136	1.340	2.476
75+	1.376	1.849	3.225
Total	86.883	89.819	176.702

g/k

Piramida Penduduk Kota Bima 2020

■ Perempuan ■ Laki-laki



Handwritten signature

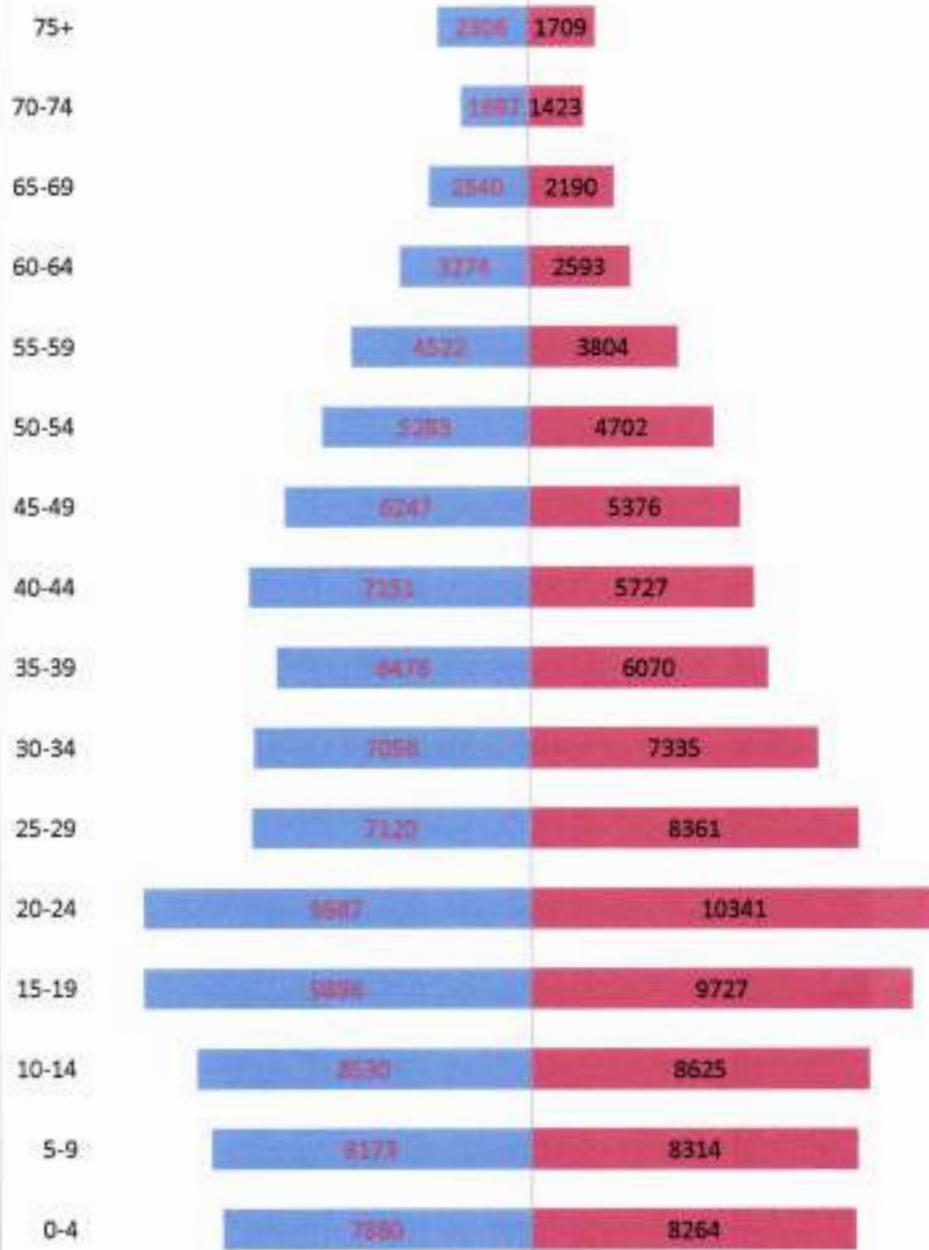
*Tabel.3.15 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2025*

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.264	7.880	16.144
5-9	8.314	8.173	16.487
10-14	8.625	8.530	17.155
15-19	9.727	9.896	19.623
20-24	10.341	9.887	20.228
25-29	8.361	7.120	15.481
30-34	7.335	7.056	14.391
35-39	6.070	6.476	12.546
40-44	5.727	7.151	12.878
45-49	5.376	6.247	11.623
50-54	4.702	5.283	9.985
55-59	3.804	4.522	8.326
60-64	2.593	3.274	5.867
65-69	2.190	2.540	4.730
70-74	1.423	1.697	3.120
75+	1.709	2.306	4.015
Total	94.561	98.038	192.599

n Nk

Piramida Penduduk Kota Bima 2025

■ Perempuan ■ Laki-laki



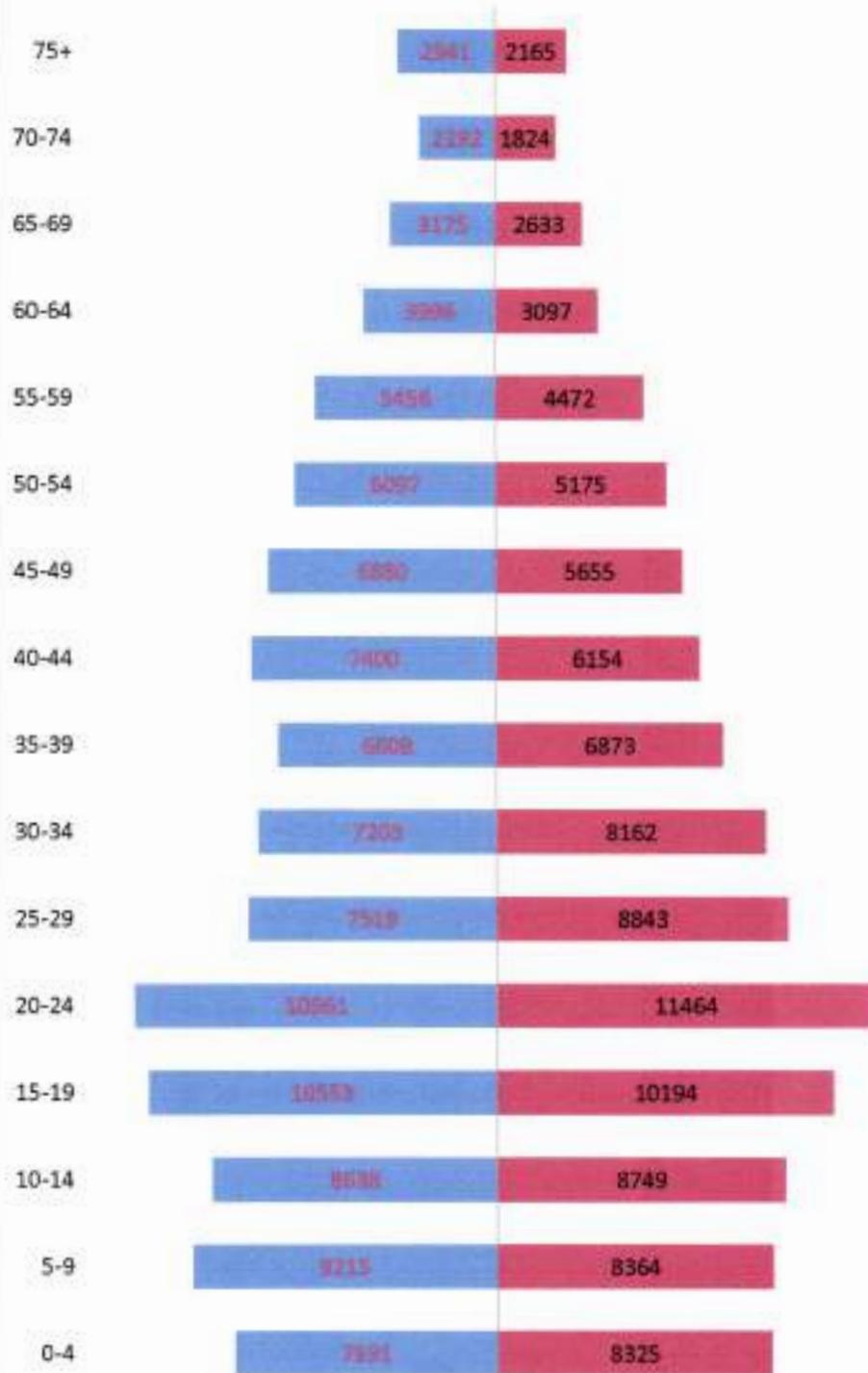
Handwritten signature

*Tabel. 3.16 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2030*

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.325	7.931	16.256
5-9	8.364	9.215	17.579
10-14	8.749	8.638	17.387
15-19	10.194	10.553	20.747
20-24	11.464	10.961	22.425
25-29	8.843	7.519	16.362
30-34	8.162	7.203	15.365
35-39	6.873	6.608	13.481
40-44	6.154	7.400	13.554
45-49	5.655	6.880	12.535
50-54	5.175	6.097	11.272
55-59	4.472	5.456	9.928
60-64	3.097	3.996	7.093
65-69	2.633	3.175	5.808
70-74	1.824	2.292	4.116
75+	2.165	2.941	5.106
Total	102.149	106.865	209.014

Piramida Penduduk Kota Bima 2030

■ Perempuan ■ Laki-laki



Handwritten signature or initials.

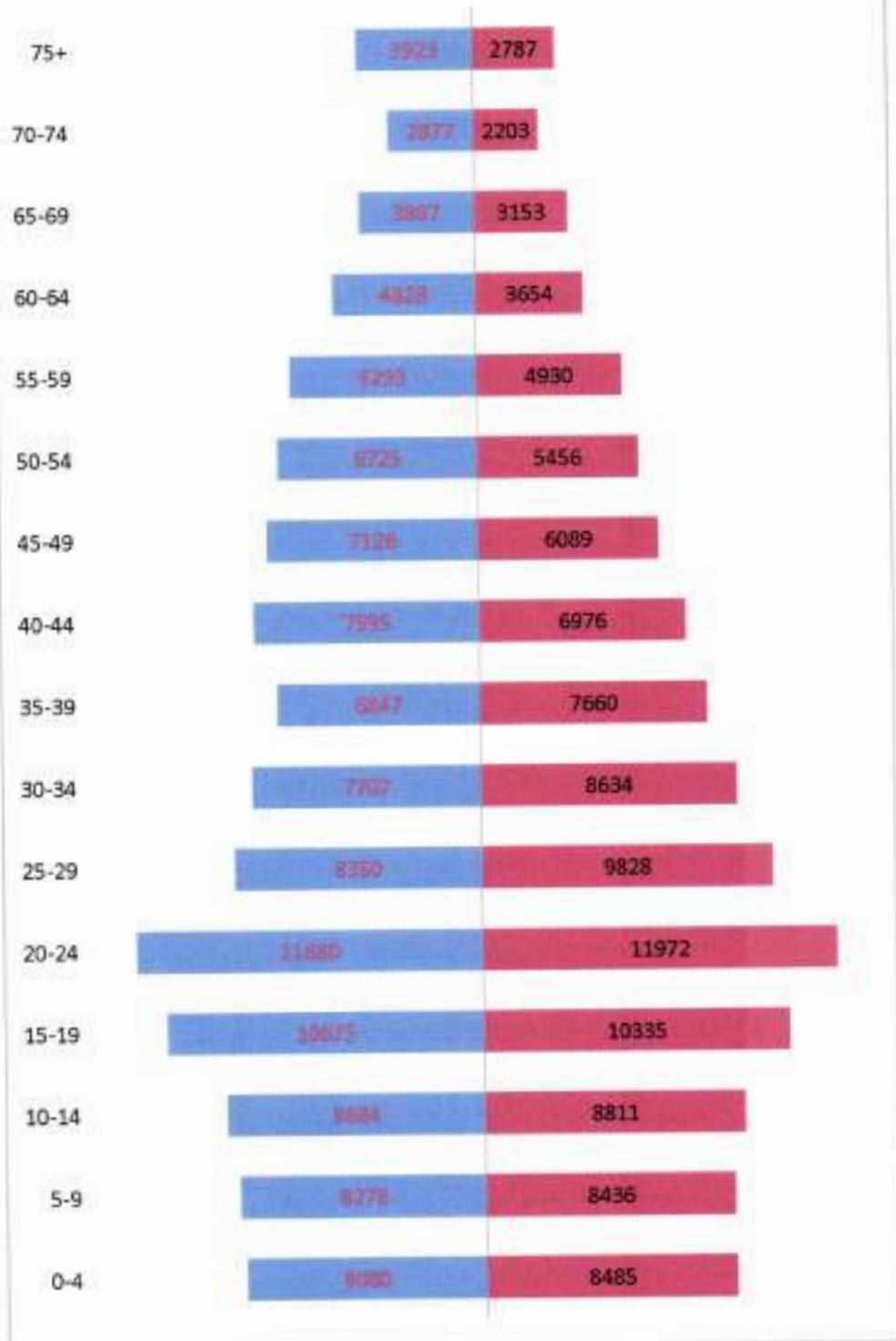
Tabel.3.17 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2035

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.485	8.080	16.565
5-9	8.436	8.278	16.714
10-14	8.811	8.684	17.495
15-19	10.335	10.675	21.010
20-24	11.972	11.680	23.652
25-29	9.828	8.350	18.178
30-34	8.634	7.707	16.341
35-39	7.660	6.847	14.507
40-44	6.976	7.595	14.571
45-49	6.089	7.126	13.215
50-54	5.456	6.725	12.181
55-59	4.930	6.293	11.223
60-64	3.654	4.828	8.482
65-69	3.153	3.887	7.040
70-74	2.203	2.877	5.080
75+	2.787	3.923	6.710
Total	109.409	113.555	222.964

e Nk

Piramida Penduduk Kota Bima 2035

■ Perempuan ■ Laki-laki



n *h*

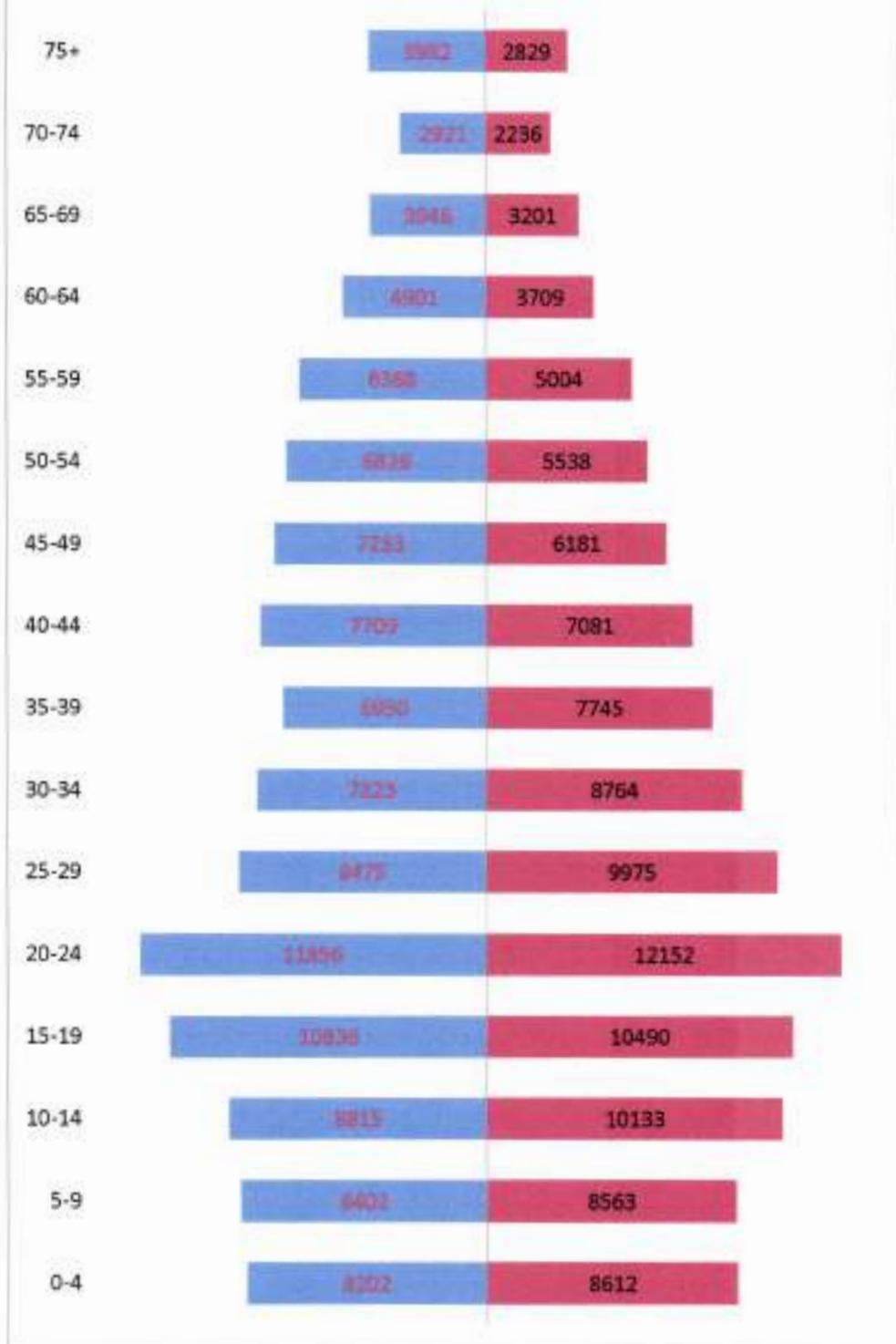
Tabel.3.18 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2040

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.612	8.202	16.814
5-9	8.563	8.402	16.965
10-14	10.133	8.815	18.948
15-19	10.490	10.836	21.326
20-24	12.152	11.856	24.008
25-29	9.975	8.475	18.450
30-34	8.764	7.823	16.587
35-39	7.745	6.950	14.695
40-44	7.081	7.709	14.790
45-49	6.181	7.233	13.414
50-54	5.538	6.826	12.364
55-59	5.004	6.388	11.392
60-64	3.709	4.901	8.610
65-69	3.201	3.946	7.147
70-74	2.236	2.921	5.157
75+	2.829	3.982	6.811
Total	112.213	115.265	227.478

Handwritten signature or initials in blue ink.

Piramida Penduduk Kota Bima 2040

■ Perempuan ■ Laki-laki



n g/k

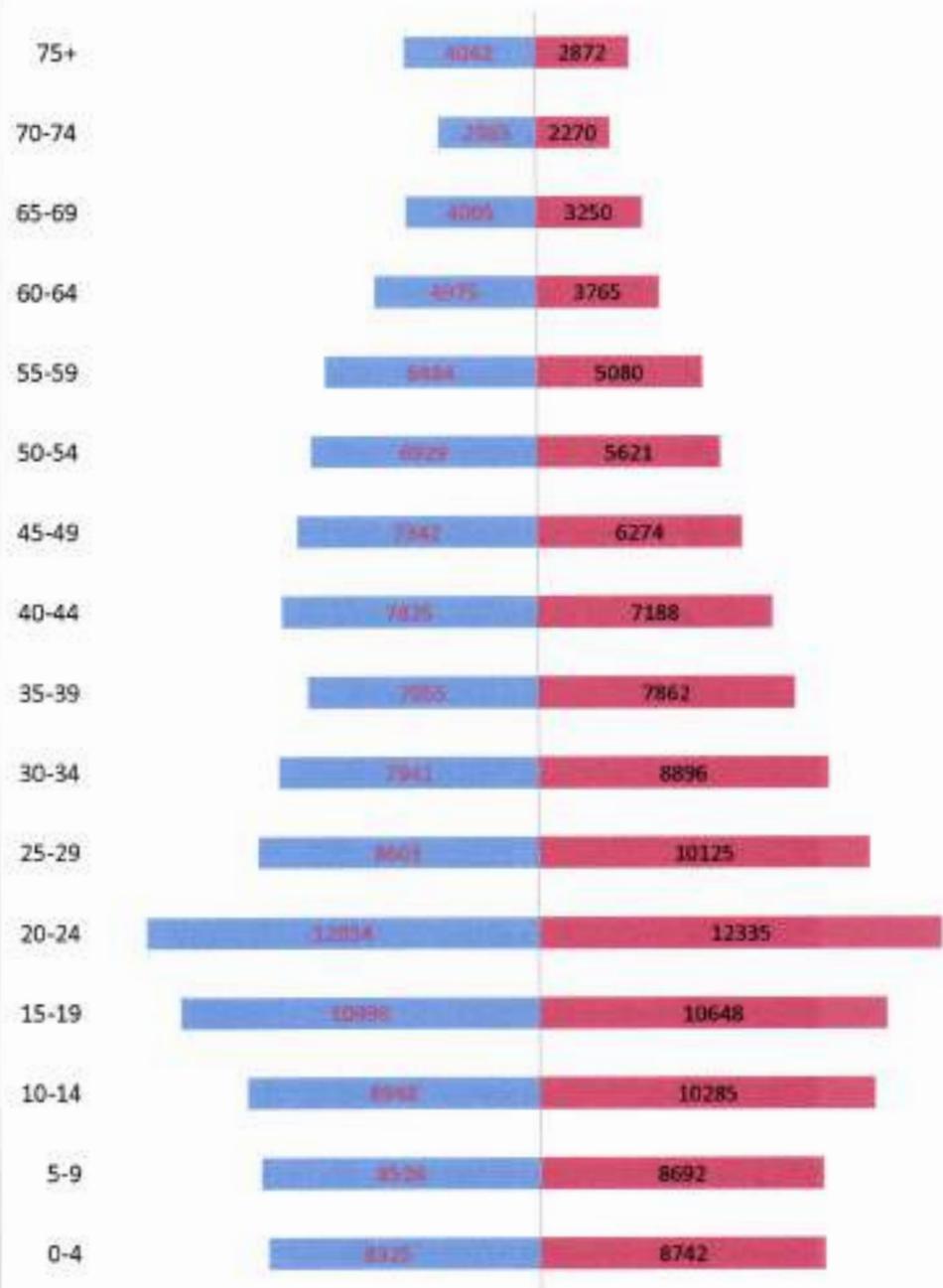
Tabel.3.19 Jumlah Penduduk Kota Bima
Tahun 2045

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.742	8.325	17.067
5-9	8.692	8.528	17.220
10-14	10.285	8.948	19.233
15-19	10.648	10.999	21.647
20-24	12.335	12.034	24.369
25-29	10.125	8.603	18.728
30-34	8.896	7.941	16.837
35-39	7.862	7.055	14.917
40-44	7.188	7.825	15.013
45-49	6.274	7.342	13.616
50-54	5.521	6.929	12.550
55-59	5.080	6.484	11.564
60-64	3.765	4.975	8.790
65-69	3.250	4.005	7.255
70-74	2.270	2.965	5.235
75+	2.872	4.042	6.914
Total	113.905	230.095	230.905

n *ML*

Piramida Penduduk Kota Bima 2045

■ Perempuan ■ Laki-laki



n *RT*

3.2. Kualitas Penduduk.

Pembangunan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera disusun dengan berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlandaskan pengembangan *pendidikan, kesehatan dan ekonomi* yang dilakukan melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

3.2.1 Aspek Pendidikan

Bahwa pendidikan nasional *berfungsi* mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, *bertujuan* untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Parameter angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk, terutama usia muda yang masih sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 3.20 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Bima, 2018

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7-12	0,01	99,4	0,0
13-15	0,0	98,8	1,2
16-18	0,0	80,0	20,0
Perempuan			
7-12	0,0	100	0,0
13-15	0,0	100	0,0
16-18	0,0	90,7	9,3
Laki-laki+Perempuan			
7-12	0,3	99,7	0,0
13-15	0,0	99,3	0,7
16-18	0,0	85,3	14,8

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan, 2015- 2016 - 2017 - 2018

Tingkat Pendidikan	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
TK				
Sekolah	62	67	68	71
Guru	233	253	291	358
Murid	681	809	844	618
SD/MI				
Sekolah	90	90	86	87
Guru	1984	1993	2064	2064
Murid	31018	31142	28854	30775
SMP/MTs				
Sekolah	37	34	34	35
Guru	1474	892	881	1057
Murid	13473	13862	14708	14706
SMA/MA				
Sekolah	24	24	28	28
Guru	579	644	663	663
Murid	4.194	3.597	3.960	4.255
SMK				
Sekolah	10	11	11	11
Guru	503	533	604	604
Murid	2.769	2.887	3.287	3.875

Sumber : Kota Bima Dalam Angka 2018

Angka partisipasi murni (APM) tingkat SD/MI/ sebesar 96,02% naik menjadi 99,07 %, SMP/MTs/ sebesar 95,37% turun menjadi 94,7% dan angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 2016 SD/MI/ mencapai 110,29 % naik menjadi 116,05 % pada tahun 2017, demikian juga untuk APK tingkat SMP/MTs/ 106,32% turun menjadi 98,04 % pada tahun 2017.

Tabel 3.21. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bima

No	Indikator kinerja Kunci (IKK)	2016 (%)	2017 (%)
1	Angka partisipasi Murni(APM) SD/MI	96,02	99,7
2	Angka partisipasi Murni(APM) SMP/MTs	95,37	94,7
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	110,29	116,05
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	106,32	98,04
5	Angka partisipasi Murni(APM) SMA/SMK/MA	73,63	75,14
6	Angka partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA	110,74	101,66

Sumber: Kota Bima dalam angka 2018

3.2.2. Aspek Kesehatan.

Dari aspek kesehatan di Kota Bima walaupun masih terus memerlukan pembenahan terutama dilihat dari sarana dan prasana, telah memiliki Rumah Sakit umum sebanyak 1 Rumah sakit

Berdasarkan Kota Bima dalam angka tahun 2018 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah sarana kesehatan lainnya yang ada di Kota Bima sudah cukup memadai, Puskesmas telah ada sebanyak 6, berarti setiap kecamatan sudah memiliki Puskesmas bahkan ada yang memiliki 2 Puskesmas, dan puskesmas pembantu sebanyak 18 pusku serta poskedes sebanyak 34, dan posyandu 163, apotik sebanyak 29, toko obat sebanyak 12.

Tabel 3.22. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tahun 2015-2019 di Kota Bima

Sarana Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah sakit umum	1	1	1	4	4
Rumah bersalin	0	0	0	0	0
Pusat kesehatan masyarakat	5	5	5	5	6
Puskesmas pembantu	19	19	19	18	18
Pos kesehatan desa	37	37	37	37	34
Pos pelayanan terpadu	163	163	163	163	163
Balai pengobatan	0	0	0	0	0
Apotik	31	31	31	22	29
Toko obat	16	16	16	16	12

Sumber : Kota Bima Dalam Angka 2018

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dengan kondisi sarana pelayanan kesehatan masyarakat di samping masih tertumpu pada Rumah Sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan sudah dioptimalkan melalui peningkatan peran posyandu.

Tabel 3.23. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bima, 2015-2017

Tenaga Kerja Kesehatan	2015	2016	2017
Medis	33	28	28
Dokter Umum	22	22	22
Dokter spesialis	0	0	0
Dokter gigi	5	6	6
Keperawatan Dan Kebidanan	254	296	296
Perawat	185	161	161
Perawat gigi	10	13	13
Bidan	114	93	93
Kefarmasian	5	21	21
Sarjana farmasi dan Apoteker	21	15	15
Asisten Apoteker	5	5	5
Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat	52	33	33
Sarjana Kesehatan Masyarakat	30	30	30
Sanitarian	25	25	25
Tenaga Gizi	20	35	35
Keterampilan fisik	3	3	3
Keteknisan Medis	9	11	11
Analisis Kesehatan	14	15	15
Psikolog		0	0
Jumlah tenaga kesehatan (nakes)	787	812	812
Jumlah tenaga non kesehatan (non nakes)	34	34	34
Jumlah tenaga kerja kesehatan	821	846	846

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

n R/h

Peningkatan Kesehatan Penduduk akan menghasilkan penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya, penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Tabel. 3.24. Jumlah Kelahiran Hidup menurut Kecamatan Kota Bima

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RasanaE Barat	647	744	800	748	726
2	RasanaE Timur	331	337	338	339	333
3	Asakota	619	678	719	740	708
4	Raba	770	798	823	822	753
5	Mpunda	777	749	784	721	679
	Kota Bima	3.144	3.306	3.464	3.370	3.199

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima

Tabel. 3.25. Jumlah Kematian Ibu per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima

No.	Kecamatan	Angka Kematian Ibu				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RasanaE Barat	2	1	2	1	0
2	RasanaE Timur	0	1	0	0	1
3	Asakota	0	2	1	1	2
4	Raba	1	1	0	3	0
5	Mpunda	0	0	0	0	3
Total		3	5	3	5	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima

Tabel 3.26. Jumlah Kematian Bayi per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	RasanaE Barat	2	4	6	3	0	3	1	2	3	7	2	9	3	1	4
2	RasanaE Timur	2	0	2	3	0	3	2	2	4	1	0	1	2	1	3
3	Asakota	5	2	7	1	1	2	3	3	6	0	1	1	3	2	5
4	Raba	4	5	9	3	4	7	2	1	3	5	1	6	1	1	2
5	Mpunda	2	3	5	6	1	7	0	1	1	3	5	8	2	3	5
Total		15	14	29	16	6	22	8	9	12	16	9	25	11	8	19

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima

Tabel. 3.27. Jumlah Gizi Buruk per-Kecamatan, 2015-2019 Kota Bima

No.	Kecamatan	Jumlah Gizi Buruk				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RasanaE Barat	-	1	1	1	1
2	RasanaE Timur	-	4	0	3	3
3	Asakota	-	3	6	5	4
4	Raba	-	2	1	3	1
5	Mpunda	-	1	3	3	4
Total		-	11	11	15	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima

Pada Tahun 2016 masih terdapat kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kota Bima sebanyak 11 kasus dari jumlah kelahiran bayi sebanyak 3.306 kelahiran hidup atau sekitar 0,46 %. Kasus tertinggi berada di kecamatan RasanaE Timur sebanyak 4 kasus dan yang terendah di kecamatan RasanaE Barat.

Tabel. 3.28. Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur Menurut Kecamatan (persen) di Kota Bima, 2018

Kecamatan	2018			
	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RasanaE Barat	0	12,50	92,08	1,25
RasanaE Timur	6,67	15,42	77,92	0
Asakota	6,25	25,83	7,08	0,83
Raba	4,58	11,67	83,75	0
Mpunda	6,25	12,92	80,00	0,83
Kota Bima	4,75	15,67	80,17	0,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima

3.2.3. Aspek Ekonomi.

Adapun untuk angka penduduk miskin Kota Bima yang berada diatas garis kemiskinan setiap tahun mengalami fluktuatif , dimana pada tahun 2015 sebesar 9,85 %, tahun 2016 sebesar 9,51 %, tahun 2017 sebesar 9,10 %, dan tahun 2018 sebesar 9,00 %. Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.29. Penduduk Miskin di Kota Bima 2015-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	274.394	15,70	9,85
2016	293.048	15,40	9,51

Sumber: Kota Bima dalam angka 2018

Menurut data yang ada bahwa PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan di Kota Bima mencapai Rp. 3.644.728,72 pada tahun 2017 dengan kondisi perkembangan yang mengalami kemajuan dari sebesar Rp. 2.994.127,63 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp. 3.300.709,27 pada tahun 2016, dengan kontribusi terbesar dari

o 9/16

sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 493.346,96 (13,54%).

Pada sektor industri pengolahan yang seharusnya dapat lebih dikembangkan untuk pengembangan agro bisnis dan agro industri justru masih rendah memberikan kontribusi terhadap PDRB yakni hanya sebesar Rp. 110.814,31 atau hanya 3,04 %, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.30. PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bima Tahun 2014-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	375 446,07	419 103,64	456 132,74	493 346,96
Pertambangan dan Penggalian	10 339,67	11 602,50	12 360,28	14 097,66
Industri Pengolahan	84 973,46	92 352,46	102 837,40	110 814,31
Pengadaan Listrik dan Gas	4 453,68	4 806,06	6 189,54	6 715,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 062,74	1 133,97	1 238,97	1 348,72
Konstruksi	232 528,23	262 620,58	292 775,06	330 481,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Speda Motor	611 022,81	690 154,42	776 810,06	879 770,47
Transportasi dan Pergudangan	271 700,05	304 326,98	334 801,01	371 197,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79 856,60	91 206,42	102 539,52	113 992,69
Informasi dan Komunikasi	41 916,79	44 737,74	49 111,33	55 619,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	62 667,71	68 924,34	76 959,25	88 943,55
Real Estate	146 189,50	163 474,41	179 414,50	195 907,11
Jasa Perusahaan	9 669,24	10 675,67	11 676,75	12 829,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348 307,37	395 400,82	419 257,39	444 130,76
Jasa Pendidikan	210 690,68	233 738,97	260 148,87	284 562,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	86 765,99	94 918,44	103 274,42	111 597,54
Jasa Lainnya	93 521,26	104 950,21	115 182,20	129 372,78

Jumlah	2 671 111,92	2 994 127,63	3 300 709,27	3.644.728,72
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Kota Bima dalam angka 2018

Tabel. 3.31. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lahu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bima, 2017

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(1)
15-19	2.405	3.462	5.867
20-24	6.350	3.188	9.538
25-29	6.280	3.637	9.917
30-34	8.125	5.995	14.120
35-39	5.326	5.092	10.418
40-44	4.248	3.187	7.435
45-49	4.294	3.748	8.042
50-54	2.533	4.831	7.364
55-59	4.318	2.187	6.505
60+	2.485	2.214	4.699
Jumlah	46.364	48.490	83.905

Sumber: Kota Bima dalam angka 2018

3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk.

Mobilitas Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk dan menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Mobilitas penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan penduduk dialami oleh daerah perkotaan merupakan salah satu potret yang mencerminkan data jumlah penduduk yang besar menempati luas daerah yang sangat terbatas.

Fenomena ini merupakan salah satu indikator ketidakmerataan persebaran penduduk cerminan banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota. Kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada

e 9/6

lingkungan hidup antara lain ketersediaan air bersih, ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, ketersediaan udara bersih, pencemaran lingkungan dan pendidikan.

Mobilitas adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Pelaku mobilitas penduduk adalah orang yang melakukan mobilitas, terdiri dari mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Seseorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non pertanian. Mobilitas penduduk horizontal, atau mobilitas penduduk geografi adalah gerak (*movement*) penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu.

Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (*space and time concept*). Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Pedukuhan (dusun). BPS mendefinisikan, seseorang disebut migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas propinsi menuju ke propinsi lain, dan lamanya tinggal di propinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih. Seseorang disebut juga migran walau berada di propinsi tujuan kurang dari enam bulan, tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal enam bulan atau lebih di propinsi tujuan.

Dalam menganalisis mobilitas penduduk para ahli juga menggunakan istilah Migrasi Internal, seperti transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya di Indonesia. Sebaliknya urbanisasi, merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, umumnya terjadi pada penduduk pulau lain yang ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik di pulau Jawa. Migrasi penduduk antar propinsi dan migrasi desa-kota merupakan

perwujudan kebijakan pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya industri dan jasa yang umumnya berlokasi di kota-kota besar.

Mobilitas penduduk sirkuler atau mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, terkait dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk kebutuhan sosial lainnya. Data mobilitas sirkuler sukar didapat, disebabkan para pelaku mobilitas sirkuler tidak memberitahukan kepergian mereka kepada kantor desa di daerah asal, begitu juga dengan kedatangan mereka di daerah tujuan.

3.3.1 Distribusi dan Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk Kota Bima kurang merata terutama di beberapa kecamatan yang padat penduduknya serta aktifitas ekonomi, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sudah baik, diantaranya kecamatan Raba 209,3 km² atau sekitar 8,4 % dari seluruh luas wilayah Kota Bima dihuni oleh penduduk sebanyak 41.099 jiwa atau sekitar 24,70 % dari jumlah penduduk Kota Bima sebanyak 166.407 jiwa.

Tabel 3.32 Luas Wilayah Dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima 2017

Kecamatan	Luas Wilayah Dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima, Tahun 2017					
	Luas Wilayah				Penduduk	
	Ha	%	km ²	%	Jumlah	%
1. RasanaE Barat	10,14	4,56	381,7	15,3	38,020	95,8
2. RasanaE Timur	64,07	28,83	222,6	8,9	17,366	98,1
3. Asakota	69,03	31,06	140,2	5,6	30,845	96,7
4. Raba	63,73	28,67	209,3	8,4	41,099	96,2
5. Mpunda	15,28	6,88	181,3	7,2	39,077	96,7
Kota Bima	222,25	100	2.503	100,0	166,407	96,5

Sumber: Kota Bima dalam angka 2018

3.3.2. Migrasi

Banyak faktor penyebab terjadinya perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya, disebabkan adanya beberapa faktor seperti yang lazim disebut dengan faktor pendorong dan faktor penarik (*push and pull factors*).

- a. Faktor pendorong antara lain makin berkurangnya sumber alam, menurunnya permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, menyempitnya lapangan kerja di daerah asal.
- b. Faktor penarik antara lain di daerah tujuan adanya kesempatan untuk memasuki lapangan kerja yang cocok dan adanya aktivitas baru di daerah tujuan seperti munculnya pusat - pusat pertumbuhan ekonomi.

3.3.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga ditujukan agar terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME yang meliputi: Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama, Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak ideal (dua), Keluarga yang berketahanan sosial, keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga berwawasan nasional, yang mampu mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia, Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya serta keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Kemampuan keluarga melaksanakan fungsinya menjadi lemah akibat kecepatan kemajuan dan perubahan perkembangan global baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sehingga dampaknya

banyak terjadi berbagai tindakan dan kondisi yang melemahkan penduduk sebagai sumber daya manusia yang mampu bersaing ditengah penduduk dunia.

Kondisi tersebut dapat kita perhatikan antara lain; jumlah keluarga pra sejahtera dan KS-1 yang masih cukup banyak sekitar 13.261 atau 32,53 % dari total jumlah keluarga, disamping itu terdapat keluarga yang termasuk penyandang masalah sosial mulai dari anak terlantar, lansia terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, ketergantungan narkoba, HIV/AIDS, eksploitasi anak, pekerja anak, penduduk berkebutuhan khusus dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, pembangunan keluarga menjadi sangat penting sebagai institusi atau unit terkecil tempat penduduk bersosialisasi yang harus dijadikan parameter dan sasaran pembangunan kependudukan dan sebagai indikator keberhasilannya adalah seberapa besar tingkat kemampuan keluarga dapat melaksanakan fungsinya.

Salah satu variabel dalam pembangunan keluarga adalah kondisi keluarga menurut tahapan kesejahteraannya meliputi Keluarga Pra Sejahtera (Pra-S), Keluarga Sejahtera 1 (KS-1), Keluarga Sejahtera 2 (KS-2), Keluarga Sejahtera 3 (KS-3) dan Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS-3+). Secara umum kondisi keluarga menurut tahapan kesejahteraannya ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) kebutuhan terhadap papan, sandang, pangan dan berbagai kebutuhan sosial lainnya.

Tabel. 3.33 Jumlah Dan Persentase Keluarga Pra-Sejahtera Dan KS-1

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera & KS-1	%
2016	40.767	13.261	32,53

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2018

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Bima telah diikutsertakan berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2015 telah diikutsertakan sebanyak 2.352 keluarga yang masuk pada Program Keluarga Harapan dengan bantuan Pemerintah Pusat dan pada tahun 2016 sebanyak 3.322 keluarga.

3.3.4. Manajemen Data Base Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen Akta-akta Catatan Sipil). Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan secara Nasional dalam menyediakan Data Penduduk (Database Kependudukan) yang terjamin akurasi dan terkini, Pemerintah mempunyai 3 (tiga) program strategis Nasional, yaitu :

1. Melaksanakan pemutakhiran Data Kependudukan:
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Data dasar (database kependudukan) adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data untuk itu, diperlukan adanya penataan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat diperlukan 2 (dua) kegiatan yang paling mendasar yaitu: Kegiatan

pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk e-KTP yang bertujuan agar semua peristiwa kependudukan akibat LAMPID (Lahir, Meninggal, Pindah dan Datang) tercatat dalam database kependudukan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan para Camat dibawah koordinasi Pemerintah Propinsi.

Kegiatan konsolidasi dan pembersihan data ganda kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online yang didukung dengan perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman e-KTP. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemutakhiran Data Kependudukan dilaksanakan disemua wilayah Kota Bima dengan penerbitan dan Pendistribusian NIK kepada penduduk per keluarga. Penerbitan NIK yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020.

NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang diberikan Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK berlaku seumur hidup, melalui NIK nantinya kegiatan identifikasi jati diri seseorang dapat dilakukan dengan mudah, termasuk pendataan penduduk untuk perpajakan Pemilihan Umum, Kriminalitas, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLS) dan lainnya.

Ada beberapa kendala dalam penertiban e-KTP sebagai berikut :

1. Peralatan e-KTP rusak.
2. Data tertahan di *server* kecamatan.
3. Kesalahan dalam pencetakan fisik e-KTP.

Saat ini sedang dibangun Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka Administrasi Kependudukan yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:



1. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk)

Pencatatan Biodata penduduk per keluarga

Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.

2. Sistem Pencatatan Sipil (Capil)

Pencatatan Kelahiran

Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan Perceraian

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan Kematian

Pencatatan pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak

Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Pencatatan peristiwa penting.

Tabel .3.34 Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Status Cetak KTP-El Tahun 2016-2017

No.	KECAMATAN	SUDAH CETAK KTP-el					
		2016			2017		
		L	P	%	L	P	%
1	RasanaE Barat	8.903	9.643	90,81	9.729	10.275	95,85
2	RasanaE Timur	5.704	5.705	91,44	5.819	6.051	95,73
3	Asakota	8.929	8.929	90,13	9.355	9.418	91,19
4	Raba	12.594	12.594	92,44	12.340	13.340	97,43
5	Mpunda	18.925	9.817	9360	9.732	10.323	94,51
	TOTAL	43.712	46.687	91,75	46.975	49.429	95,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Handwritten signature/initials

Tabel 3.35 Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan dan Cetak Kartu Keluarga (KK)

No.	KECAMATAN	SUDAH CETAK KARTU KELUARGA (KK)									
		2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	RasanaE Barat	252	100	348	100	489	100	596	100	683	100
2	RasanaE Timur	149	100	208	100	293	100	288	100	311	100
3	Asakota	290	100	279	100	361	100	459	100	508	100
4	Raba	412	100	474	100	591	100	621	100	756	100
5	Mpunda	272	100	292	100	517	100	584	100	691	100
	TOTAL	1.375	100	1.601	100	2.251	100	2.548	100	2.949	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel 3.36 Penduduk Kota Bima menurut Kecamatan dan Cetak Akta Kelahiran

No.	KECAMATAN	SUDAH CETAK AKTA KELAHIRAN					
		2017	%	2018	%	2019	%
1	RasanaE Barat	7.909	27,29	9.026	31,56	10.831	36,59
2	RasanaE Timur	5.427	32,19	6.446	38,23	7.354	42,38
3	Asakota	8.287	29,10	9.963	35,04	11.817	39,34
4	Raba	11.736	32,60	13.053	36,44	15.209	41,33
5	Mpunda	8.834	32,74	10.481	36,67	11.959	39,81
	TOTAL	42.193	30,73	48.969	35,41	57.170	39,75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

g/k

BAB IV

KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

Pada uraian dalam bab-bab sebelumnya, bahwa berbagai isu pokok di bidang kependudukan yang meliputi indikator pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan data base dan informasi penduduk memperlihatkan masih adanya tingkat kesenjangan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Artinya di masa mendatang Kota Bima dihadapkan pada persoalan-persoalan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan.

Oleh sebab itu perlu dikaji dan dianalisa berbagai kondisi baik dari aspek faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (tantangan, dan peluang) dalam upaya pembangunan kependudukan di Kota Bima.

4.1 Kekuatan

Dalam menentukan kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kota Bima saat ini maupun yang akan datang perlu dikaji dan dipahami kekuatannya antara lain :

1. Dalam aspek kuantitas penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk yang berada pada posisi 2,1 % setiap tahunnya, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang masih berada di atas 2,5 % bahkan ada yang diatas 2 % dan dengan adanya upaya penurunan Total Fertility Rate (TFR) sekitar 4,0 anak pada tahun 2015 menjadi 2,3 anak pada tahun 2020, dimana penurunan TFR tersebut merupakan kontribusi dari meningkatnya jumlah PUS yang ber KB sebanyak 86,64 % dengan mix kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 53,8 %, disamping itu terjadi peningkatan usia kawin pertama bagi perempuan sebesar 22,3 tahun.
2. Struktur umur penduduk muda yakni adanya penduduk usia dibawah 15 tahun yang cukup besar di atas 45 % yang memberikan peluang untuk mendapatkan potensi akan tersedianya kelompok

penduduk usia muda yang terampil dan mandiri dimasa yang akan datang.

3. Rata-rata lama sekolah Kota Bima yakni 10,14 tahun tingkat partisipasi penduduk perempuan usia 7-12 tahun yang bersekolah SD dan usia 13-16 tahun yang bersekolah di SLTP masing masing sebesar 100 %.
4. Dari segi kualitas kesehatan adanya kondisi yang sudah mulai membaik jika dilihat dari Gizi buruk hanya 6 kasus tahun 2016 dibandingkan jumlah kelahiran bayi sebanyak 3.248 jiwa pada tahun 2016 dan bayi yang lahir dengan gizi buruk tersebut langsung dilakukan perawatan.
5. Dari aspek ekonomi penduduk, terdapat penurunan penduduk miskin dengan persentase dibawah angka dua digit atau dibawah 10 persen yakni sebesar 9,78 %, dan dengan PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahunnya terus meningkat dari Rp. 325.619.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.57775.000,- pada tahun 2016.
6. Mobilitas penduduk Kota Bima cenderung lebih banyak yang masuk (migrasi In) dibanding yang keluar (migrasi Out), hal demikian berpotensi mendapatkan penduduk dengan usia produktif, dan akan menjadi tenaga kerja yang produktif, kecenderungan terjadinya Migrasi masuk hanya berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dan mulai tahun 2015 terjadi sebaliknya yakni penduduk keluar sudah mulai lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang masuk.
7. Dalam bidang Pembangunan Keluarga di Kota Bima telah memiliki data mikro keluarga sehingga dapat diketahui jumlah keluarga yang telah sejahtera dan yang belum sejahtera. Saat ini terdapat keluarga yang sejahtera (KS-II,III dan III+) sebanyak 27.506 kk dari 40.767 kk yang ada atau sekitar 67,47 % yang semakin lama semakin meningkat. Keluarga yang memiliki kemampuan menyejahterakan keluarganya tersebut menjadi potensi yang cukup besar dalam mengembangkan strategi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas.



8. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah memiliki berbagai sumber data baik dari catatan dan statistik administrasi kependudukan catatan sipil, hasil Sensus Penduduk, SDKI, Susenas, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin/reguler, data mikro keluarga (hasil pendataan keluarga), serta hasil sensus, survey dan data statistik rutin sektor lainnya.
9. Dalam aspek dukungan lainnya adanya dukungan politis dan dukungan operasional dari semua pihak baik dari legislatif, pihak swasta dan berbagai lapisan masyarakat, telah memberikan perhatian, dorongan dan dukungan yang sangat besar dalam pembangunan kependudukan di Kota Bima dengan dituangkannya kedalam RPJMD. Serta adanya jaringan kelembagaan sampai tingkat lini lapangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan seperti PPKBD, Sub PPKBD serta kader PKK, kader KB dan sebagainya.

4.2 Kendala.

Walaupun penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan di Kota Bima yang telah memberikan dampak positif tidak terlepas dari adanya kelemahan yang dihadapi antara lain:

1. Pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan fertilitas yang masih cukup tinggi yakni 4,89 anak mengakibatkan lambatnya kondisi penduduk tumbuh seimbang serta masih lamanya waktu akan terjadinya bonus demografi di Kota Bima yang ditandai dengan terjadinya angka ketergantungan atau *dependency ratio* yang semakin membaik
2. Tingkat efektifitas kesertaan dari PUS ber KB yang sangat rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru sehingga tidak banyak daya ungitnya untuk menurunkan fertilitas. Hal ini disebabkan segmentasi sasaran program belum difokuskan kepada PUS Usia Muda Paritas Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang benar benar murni bukan dari peserta KB ganti cara



yang dicatat sebagai peserta KB baru, disamping itu masih ada wanita melakukan kawin pertama di usia 16-18 tahun.

3. Tingkat pendidikan penduduk yang relative masih rendah 8,9 tahun menunjukkan masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, serta masih rendahnya minat dan perhatian untuk mengembangkan pendidikan vokasional yang menciptakan penduduk yang kreatif, inovatif, trampil dan mandiri dan mampu mengembangkan sektor industri pengolahan terhadap hasil dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Masih terjadinya angka kelahiran bayi dengan gizi kurang bahkan gizi buruk yang didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah dijangkau termasuk Pos Pelayanan Terpadu dan sebagainya.
5. Kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dalam menjaga serta memelihara kesehatan keluarganya, memeriksakan ibu hamil, memeriksakan bayi serta pemberian gizi, imunisasi dan lain-lain serta lingkungan yang sehat, merokok di sembarangan tempat termasuk pengolahan limbah atau sampah.
6. Persebaran penduduk yang tidak merata serta kepadatannya yang membutuhkan penataan sehingga terciptanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lahan atau lingkungan.
7. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang relative masih cukup banyak 14.545 kk yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dientaskan dan ditingkatkan menjadi keluarga yang sejahtera
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan serta belum sepenuhnya dilakukan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, data dan informasi penduduk yang belum terintegrasi serta pemanfaatannya dalam sistem pengambilan keputusan pembangunan berwawasan penduduk.



9. Kurangnya terjadi saling bersinergi (*Concerted Efforts*) terintegrasinya berbagai kebijakan dan program pembangunan diantara Pemangku Kebijakan Pembangunan Kependudukan (Pengendalian Kuantitas, Pengembangan Kualitas, Penataan Mobilitas, Pembangunan Keluarga dan Data Base Penduduk). Terbatasnya jumlah tenaga Penyelenggara Pembangunan kependudukan baik dalam aspek pengendalian kuantitas penduduk (tenaga lapangan KB, kader KB), aspek kualitas penduduk (tenaga medis, guru), tenaga lainnya seperti tenaga pencacah administrasi penduduk dan sebagainya.

4.3 Tantangan

Disamping kekuatan dan kelemahan yang dihadapi, Pembangunan Kependudukan di Kota Bima, masih menghadapi berbagai tantangan atau ancaman, antara lain:

1. Dalam aspek kuantitas penduduk masih terdapat kelambatan penurunan fertilitas yang cukup besar 2,48 anak yang disebabkan adanya keinginan yang kuat terhadap pengertian anak ideal yang lebih dari dua anak serta adanya dukungan budaya dan adat yang berlaku.
2. Dalam bidang kualitas penduduk khususnya pada aspek pendidikan masih belum adanya keserasian dalam pengintegrasian visi, misi serta kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional dari tingkat pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Demikian pula dalam aspek pembangunan kesehatan serta pembangunan dalam bidang perekonomian yang belum saling mendukung dan terintegrasi.
3. Pada aspek penataan mobilitas dan penataan kepadatan serta persebaran penduduk yang belum selaras dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, adanya kondisi yang di beberapa kecamatan yang sudah kurang kondusif terhadap kelayakan penduduk untuk mendapatkan daya dukung dan daya tampung memadai untuk kesejahteranya sehingga menjadikan Kota Bima sebagai wilayah yang menarik minat untuk bermigrasi.

✓ Nk

4. Tantangan yang dihadapi dari segi pembangunan keluarga, adalah kemampuan keluarga dalam menghadapi kecepatan perkembangan dan kemajuan global sehingga jika tidak diberdayakan secara dini dan baik akan menjadikan keluarga-keluarga di Kota Bima semakin rentan untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi keluarganya serta semakin meningkatnya keluarga yang tidak memiliki tabungan.
5. Kondisi perekonomian dunia yang memburuk serta ketidakmampuan pemerintah pusat mengatasi persoalan-persoalan serta dampak ekonomi global membuat rendahnya daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin menurun, lambatnya penurunan angka kemiskinan.
6. Bervariasinya dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota tentang pentingnya Program Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
7. Seiring dengan berkembangnya pengaruh globalisasi dan informasi dewasa ini, serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan pula tantangan baru dalam upaya memberikan pelayanan yang harus semakin berkualitas, dan meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan dan hak-hak penduduk, serta semakin derasnya arus informasi dan globalisasi akan berdampak pula terhadap masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa, yang akan mengancam ketahanan keluarga.

4.4 Peluang

Dalam melaksanakan pembangunan kependudukan, banyak peluang - peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka semakin jelas kewenangan serta pembagian urusan serta menjadikan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah kabupaten/kota serta adanya kelembagaan yang mengurusinya.



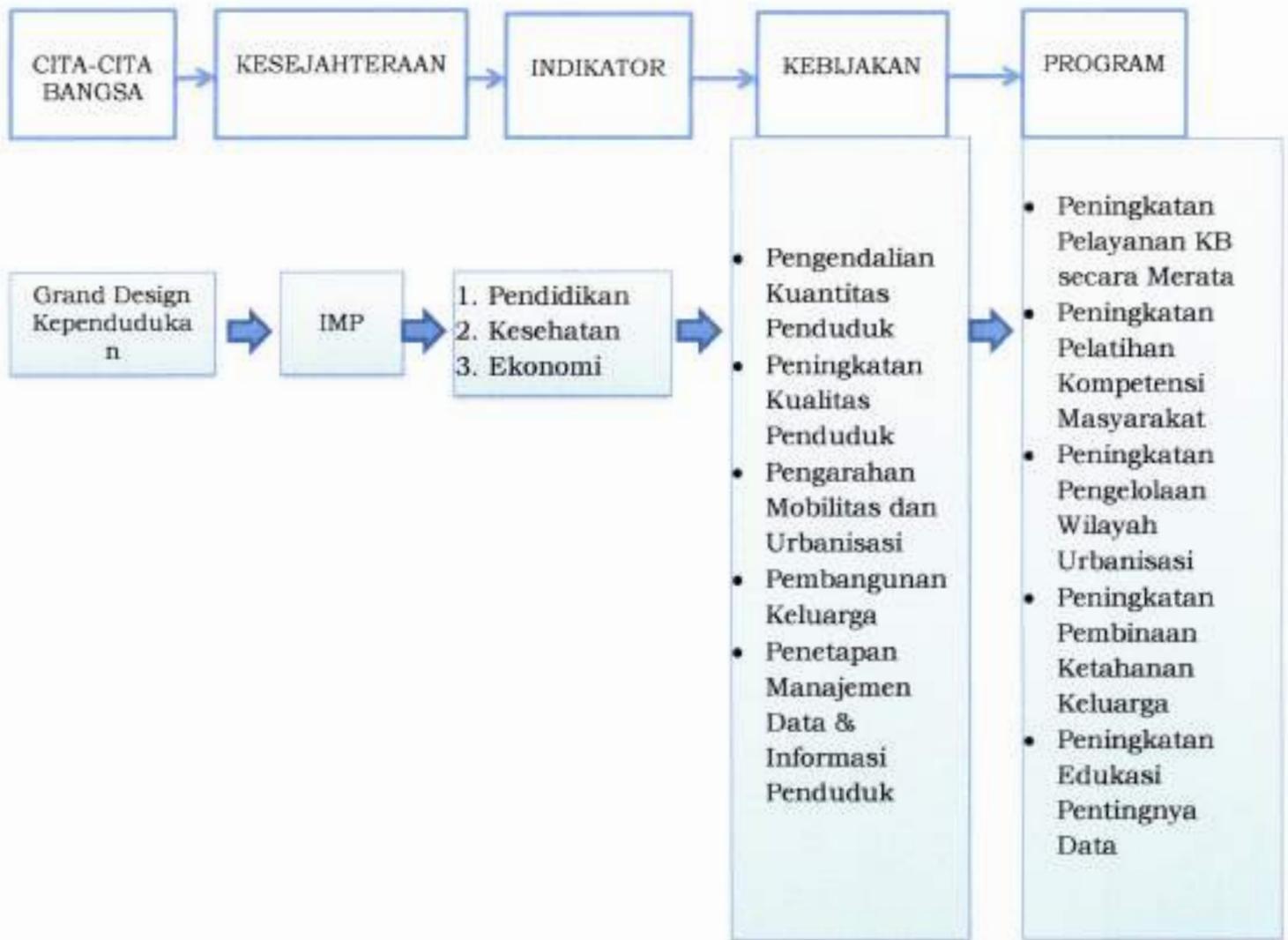
2. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan Kependudukan dan KB menjadi bagian dari prioritas nasional maupun daerah yang dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD serta berbagai dokumen perencanaan nasional maupun daerah.
3. Berbagi sumber pembiayaan yang tersedia baik APBN, APBD, DAK, ADDes serta berbagai sumber keuangan masyarakat yang dapat menjadikan Program Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga semakin baik.
4. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga. Sikap dan perilaku yang kondusif masyarakat ini memberikan peluang bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengembangan dalam memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mutu pelayanan pembangunan kependudukan. Selain itu perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan dan akses data base dan informasi, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya, termasuk penyediaan data mikro keluarga bersekala nasional. Disamping itu, pengembangan teknologi tepat guna yang mampu menyediakan perangkat yang dibutuhkan bagi pembangunan berwawasan kependudukan.
6. Meningkatnya dukungan dan partisipasi para mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kependudukan serta sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah dari Universitas/Perguruan Negeri maupun swasta para Tokoh Lintas Agama dan para Stakeholders lainnya.



7. Keberadaan pusat pelatihan dan penelitian berbagai program dalam Pembangunan Kependudukan. Dukungan komitmen Internasional, yaitu adanya dan disetujuinya oleh Pemerintah Indonesia berbagai komitmen dan kesepakatan internasional seperti ICPD Cairo tahun 1994, dan MDGs tahun 2000, yang memberikan dasar kerjasama upaya global untuk meningkatkan kualitas dan hak-hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan Gender, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Nh

BAB V
KERANGKA PIKIR (ROAD MAP) PERUMUSAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA



Handwritten signature/initials in blue ink.

Gambar 5.1 Roadmap Kebijakan dan Program Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan



PARAMETER KEPENDUDUKAN

- **Kuantitas Penduduk**
 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
 2. Laju Pertumbuhan Penduduk
 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 4. Proyeksi Penduduk
 5. Total Fertility Rate (TFR)
 6. Angka Usia Kawin Pertama Bagi Wanita
 7. Indikator Keluarga Berencana
 8. Persentase MKJP
 9. Persentase Wanita Kawin Pertama Umur < 18 Tahun
- **Kualitas Penduduk**
 1. Pendidikan
 - Lama Sekolah & Lama Harapan Sekolah
 - Angka Partisipasi Sekolah
 - Angka Melek Huruf
 - Penduduk Menurut Usia Sekolah

Handwritten signature

2. Kesehatan
 - Angka Harapan Hidup
3. Ekonomi
 - Pengeluaran Perkapita Sebulan
4. Ketenagakerjaan
 - Jumlah Penduduk Usia Kerja
 - Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Roadmap Pembangunan Kependudukan

5 Aspek Pembangunan Kependudukan

1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk
4. Roadmap Pembangunan Keluarga
5. Roadmap Penataan Data Basis & Info Penduduk

Strategi (Kebijakan & Program) untuk mencapai Masyarakat Makmur dan sejahtera

Gambar 5.2 Roadmap Kebijakan dan Program Pengendalian Kuantitas Kependudukan



Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 5.1 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Bima 2020-2045

NO	Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,97	1,68	1,49	1,32	1,17	1,02
2	Total Fertility Rate (Rata-rata wanita punya anak)	2,25	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00
3	Usia Kawin Pertama Bagi Wanita	20	20	21	22	22	23

Gambar 5.3 Roadmap Kebijakan dan Program Pengendalian Kualitas Kependudukan



[Handwritten signature]

Tabel 5.2 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk di Kota Bima 2020-2045

NO	Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	<u>Pendidikan</u> - Lama sekolah (tahun) - Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (%)	10,38 99,18	11,21 99,20	12,04 99,22	12,87 99,24	13,70 99,26	14,53 99,28
2	<u>Kesehatan</u> Angka Harapan Hidup (thn)	70,20	70,51	70,82	71,13	71,44	71,75
3	Ekonomi Pengeluaran Perkapita Perbulan (Ribu)	1.399	1.409	1.420	1.431	1.442	1.452

Gambar 5.4 Roadmap Kebijakan dan Program Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan



Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 5.3 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator Parameter Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kota Bima 2020-2045

NO	Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bima (%)	1,97	1,68	1,49	1,32	1,17	1,02

Gambar 5.5 Roadmap Kebijakan dan Program Pembangunan Keluarga



n g v k

Tabel 5.4 Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator Parameter Pembangunan Keluarga Kota Bima 2020-2045

NO	Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Persentase penduduk miskin	8,6	7,51	6,42	5,33	4,23	3,14
2	Rata-rata banyaknya anak dalam keluarga	2	2	2	2	2	2
3	Indeks Pembangunan Gender	69,91	71,54	73,17	74,80	76,43	78,06

Gambar 5.6 Roadmap Kebijakan dan Program Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan



Kesimpulan

Data kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah diperoleh berdasarkan survey sosial ekonomi nasional sehingga secara metodologi data tersebut tidak dapat diestimasi/diperkirakan.

ke WALIKOTA BIMA, *W*

LU
MUHAMMAD LUTFI

Wk